LIBERALISASI POLITIK ETNIS TIONGHOA

(Studi tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dalam Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K 4.2012 07 P1
No REG : 4.2012/P1/07
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Disusun Oleh:

M. Fajar Ismail

NIM: E34208002

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2012

GEDUNG BELANG
Jl. P. Kuta No. 84
Wonocolo Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh M. Fajar Ismail ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Pembimbing

Laili Bariroh, M.Si
NIP197711032009122002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh M. Fajar Ismail ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Mengesahkan, Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

DR. H. Ma'shum, M.Ag

NIP. 196009141989031001

Ketua,

Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Sekretaris,

M. Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

Penguji I,

DR. Khoirul Yahya, M.Si

NIP. 197202062007101003

Penguji II,

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstraksi

Penelitian ini berjudul 'Liberalisasi Politik Etnis Tionghoa' (Studi tentang partisipasi politik etnis Tionghoa di DPRD Surabaya). Penelitian ini fokus pada: bagaimana etnis Tionghoa memanfaatkan peluang liberalisasi politik, kemudian apa motif etnis Tionghoa terjun ke politik praktis, dan bagaimana performance etnis Tionghoa di DPRD Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etnis Tionghoa memanfaatkan peluang liberalisasi politik, motif mereka terjun ke politik, serta mengeksplorasi bagaimana sepak terjang etnis Tionghoa di DPRD Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *deskriptif analysis*. Peneliti mengambil lokasi di DPRD Surabaya, dengan unit analysis anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam dengan informan. Metode pemilihan informan menggunakan teknik *purpossive sampling,* yakni teknik yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik dimiliki oleh sampel itu. Data-data yang diperoleh melalui wawancara tersebut didukung dengan data yang dihasilkan melalui dokumentasi. Setelah itu, data-data tersebut dianalisis menurut model Miles dan Huberman. Tahapannya yaitu reduksi data, Penyajian data verifikasi dan penarikan simpulan. Selanjutnya yakni dengan teknik pengabsahan data, dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil temuan penelitian adalah. *Pertama*, liberalisasi politik dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa melalui partisipasi politik. Partisipasi politik etnis Tionghoa dapat dikategorikan menjadi dua: Pertama, partisipasi aktif yaitu etnis Tionghoa yang terjun ke politik praktis (dalam hal ini anggota DPRD Surabaya). Kedua, partisipasi pasif yaitu etnis Tionghoa yang mengikuti atau bahkan tidak mengikuti kegiatan pemerintah, seperti pemilihan umum. *Kedua,* motif politik. Terdapat dua motif untuk terjun ke politik. Pertama, faktor lingkungan, baik keluarga atau pun pergaulan/kelompok. Kedua, memanfaatkan sistem demokrasi yang memberi peluang semua warga Negara untuk memilih dan dipilih serta modal ekonomi menjadi kekuatan utama politik etnis Tionghoa untuk terjun ke dunia politik. *ketiga*, Performance anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa di Surabaya dapat kita lihat dengan bagaimana mereka melakukan bargaining power. Mereka tidak membawa kepentingan etnis didalamnya, tetapi motif politis menjadi salah satu faktor bagaimana sepak terjangnya di politik. Namun ada juga anggota dewan yang benar-benar mengemban amanah rakyat sesuai dengan apa yang dilakukan pada komisinya.

Keywords : etnis Tionghoa, partisipasi politik, liberalisasi politik, bargaining power

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Persetujuan Pembimbing

Halama Pengesahan

Motto

Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstraksi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... ... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian..... 8

E. Penegasan Judul..... 9

F. Kajian Pustaka..... 10

G. Metode Penelitian..... . 12

H. Lokasi Penelitian..... 13

I. Jenis dan Sumber Data..... 14

J. Teknik Pengumpulan Data..... 16

K. Metode Analisis Data..... 18

L. Teknik Pengabsahan Data.....19

M. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II. KERANGKA TEORI

A. Konsep Liberalisasi Politik..... 21

B. Konsep Pluralisme Politik..... 27

C. Konsep Partisipasi Politik..... 31

D. Konsep Perilaku Politik..... 34

E. Teori Pilihan Rasional..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Etnis Tionghoa..... 40

BAB III. SETTING PENELITIAN

A. Aspek Ekonomi..... 43

C.1. Pola Tradisionalisme..... 46

C.2. Pola Kapitalisme..... 48

C.3. Pola Perekonomian Imperialisme..... 50

B. Aspek Budaya..... 50

C. Aspek Sosial-Politik..... 52

D. Dinamika Politik di Surabaya..... 55

E. Sebaran Etnis Tionghoa di Surabaya..... 58

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Liberalisasi Politik Etnis Tionghoa di Surabaya

A.1. Kebebasan..... 62

A.2. Demokrasi..... 64

A.3. Pluralisme..... 66

A.4. Identitas Tionghoa..... 67

B. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Surabaya

B.1. Partisipasi Politik Aktif.....70

B.2. Partisipasi Politik Pasif..... 73

C. Latar Belakang Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

C.1. Motif Etnis Tionghoa di Dunia Politik Praktis..... . 75

C.2. Modal Sosial Politik Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya..... 79

C.3. Modal Ekonomi Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya..... 82

D. Performance Anggota Dewan Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya... 87

E. Respon Terhadap Keterlibatan Etnis Tionghoa Dalam Politik.....90

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran..... 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perolehan kursi anggota DPRD Surabaya yang berasal dari Etnis Tionghoa pada pemilu 2004..... 58

Tabel 2. Perolehan kursi anggota DPRD Surabaya yang berasal dari Etnis Tionghoa pada pemilu 2009 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari segi kuantitas etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok minoritas di Indonesia. Kehidupan kelompok ini sangat menarik dibahas terkait dengan wilayah yang berhubungan dengan ranah publik. Etnis Tionghoa di Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit ketika ia harus menjadi suatu kelompok yang tidak mendapat tempat di Indonesia. Sudah sejak lama orang-orang keturunan Tionghoa menemukan masalah dalam menentukan jati diri mereka. Di satu sisi, saat ini hampir seluruh dari mereka merasa sebagai orang Indonesia yang hidup dan tinggal di negeri yang mereka cintai. Akan tetapi di sisi lain, sudah lama mereka tidak diakui keberadaannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh penguasa yang dianggap sangat merugikan orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Peristiwa Tersebut sangat mereka rasakan ketika Orde Baru masih berkuasa di Indonesia.

Pada saat Orde Baru, orang yang berasal dari etnis Tionghoa oleh penguasa diperlakukan berbeda (diskriminatif) dengan warga negara Indonesia lainnya. Berbagai kebijakan yang dibuat sangat membatasi ruang gerak etnis Tionghoa untuk dapat hidup dengan aman dan nyaman di negara yang sebenarnya mereka cintai ini. Adanya tekanan dari penguasa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa juga berimbas kepada persepsi masyarakat terhadap orang yang berasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari etnis Tionghoa. Kehidupan sehari-harinya juga dihantui oleh rasa kekhawatiran dalam setiap aktivitas yang dijalaninya.

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama.[1] Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.

Tidak hanya itu, pembatasan di ranah publik sangat banyak, yakni kegiatan atau aktivitas yang berbau politik dilarang keras oleh Soeharto. Jikalau ada kegiatan berbau politik maka habis sudah riwayat mereka. Maka dari itu, orang Tionghoa tidak berani melakukan hal tersebut, disisi lain mereka juga merasa sebagai kelompok minoritas di Indonesia.

Wilayah diskriminatif lain juga dapat kita lihat dari segi budaya, dilarangnya tarian barongsai beredar di setiap pertunjukan merupakan salah satu bukti. Dari segi pers, dapat kita lihat dengan dilarangnya majalah atau koran yang berbau cina/mandarin untuk beredar. Yang paling gencar dibicarakan pada saat Orde Baru adalah masalah administratif kenegaraan orang Tionghoa, seperti pada saat membuat KTP orang Tionghoa dipersulit atau bahkan tidak dilayani oleh petugasnya. Hingga munculnya kasus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).[2]

---

[1] Leo Suryadinata. *Negara dan Etnis Tionghoa.*(Jakarta: LP3ES, 2002). 72
[2] Wahyu effendi. *Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI.* (Jakarta: Visimedia, 2008). 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua itu mulai mendapatkan titik terang terkait masa depan etnis Tionghoa tatkala peristiwa 1998 bergulir, reformasi yang didengungkan rakyat Indonesia terkait dengan pelengseran Soeharto seolah menjadi angin segar bagi kelompok etnis Tionghoa. Meskipun pada saat itu kelompok Tionghoa juga menjadi korban atas peristiwa 1998. Saat itu orang-orang yang berasal dari Tionghoa diperlakukan secara tidak manusiawi oleh massa pada saat itu, sebagaian orang ada yang diperkosa, toko/kios warung dijarah, pengerusakan gedung/rumah Tionghoa, bahkan ada yang sampai terbunuh.

Pasca 1998, warga Tionghoa mulai mendapat titik terang terkait masa depan kelompoknya. Jika selama rezim Orde Baru orang-orang Tionghoa hanya berkonsentrasi di wilayah bisnis saja, maka di masa Reformasi terjadi perubahan. Mereka sekarang mencoba memasuki wilayah-wilayah lain yang selama tiga puluh dua tahun tertutup baginya. Etnis Tionghoa sekarang telah berani tampil ke depan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara dengan menuntut dan mengubah seluruh peraturan-peraturan yang diskriminatif.

Upaya yang kemudian mereka lakukan adalah mencoba mengubah kebijakan pemerintah yang diskriminatif melalui pendekatan-pendekatan politik, baik oleh individu-individu tertentu maupun oleh perkumpulan-perkumpulan etnis Tionghoa yang bertumbuh setelah peristiwa Mei 1998, seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).[3]

---

[3] Wibowo, Thung Ju Lan (ed). *Setelah Air Mata Kering*. (Jakarta: Kompas, 2010). 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang pelarangan ekspresi kebudayaan Cina di ruang publik melalui keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, serta dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang baru Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang ini menempatkan warga Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga Negara yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[4]

Pasca reformasi muncullah berbagai organisasi yang bernuansa Tionghoa. Adanya kebebasan untuk membentuk perkumpulan bagi kalangan etnis Tionghoa menyebabkan menjamurnya berbagai perkumpulan yang bercirikan Tionghoa. Alasan lain adalah untuk menuntut kembali hak-hak konstitusional yang selama Orde Baru dikekang oleh Soeharto. Beberapa orang Tionghoa mengambil langkah, yakni dengan mendirikan organisasi-organisasi yang secara langsung memperjuangkan penghapusan produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Organisasi-organisasi yang bermunculan adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), dan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) yang muncul tidak lama setelah kerusuhan Mei 1998. Disamping itu dapat ditambahkan beberapa organisasi yang muncul di Jakarta, seperti Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (Gandi) yang kini dipimpin Wahyu Effendi dan Lembaga Anti Diskriminasi di Indonesia yang diketuai Rebeka Harsono, juga sebuah "Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa di Indonesia" yang dipimpin Edy Sadeli, S.H. Ini belum terhitung

---

[4] Wibowo, Thung Ju Lan (ed). *Setelah Air Mata Kering*. (Jakarta: Kompas, 2010). 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak organisasi di daerah, terutama di kota-kota yang pernah mengalami kerusuhan anti-Tiongkok.[5]

Dari beberapa organisasi yang ada, salah satu yang paling eksis hingga saat ini adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Perhimpunan INTI yang secara periodik mengadakan diskusi-diskusi dan seminar-seminar politik dengan berbagai tema dan narasumber dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik para anggota dan simpatisannya. Hasilnya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jika pada awalnya peserta diskusi dan seminar-seminar tersebut hanya sedikit, namun sekarang setiap event diikuti oleh ratusan orang secara tekun dan aktif. Padahal perhimpunan INTI bukanlah sebuah organisasi politik praktis.

Perhimpunan INTI tidak mencantolkan diri kepada kekuatan politik apapun dan berusaha selalu independen. Dalam menghadapi pemilu, perhimpunan INTI menganjurkan para anggota dan simpatisannya untuk menggunakan hati nurani dan pengetahuan politiknya untuk menentukan pilihannya.[6] Jika kita flashback sejenak, etnis Tionghoa tidak serta merta apolitik. Hanya saja kekuatan minoritas yang dijalankan oleh Tionghoa kalah dengan suara mayoritas diluar yang mengecam segala bentuk tingkah laku etnis Tionghoa. Fakta sejarah mengungkap politisi berdarah Tionghoa ikut ambil bagian dalam pasang-surut perpolitikan tanah air. Mereka aktif berjuang bersama kelompok lain sejak Indonesia belum merdeka. Namun peran politisi Tionghoa sempat meredup saat

---

[5] Ibid... 35
[6] Ibid... 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rezim Orde Baru berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Di era reformasi, sejumlah politisi keturunan Tionghoa kembali mewarnai kancah politik.[7]

Setelah reformasi bergulir, mereka mencoba untuk masuk kembali ke dalam dunia politik dengan ide mendirikan sebuah partai yang mengatas namakan etnis Cina atau Tionghoa. Ini adalah salah satu usaha untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Walaupun beberapa kalangan yang berasal dari etnis Cina sendiri menolak gagasan ini, namun ini bisa dianggap sebagai usaha mereka untuk ikut andil dalam membangun bangsa lewat jalur politis. Hal ini bisa juga dilihat sebagai usaha untuk merebut kembali hak politik mereka setelah sekian lama terabaikan.[8]

Salah satu bentuk kegiatan politik yang dilakukan adalah mereka terjun ke politik yakni dengan mendirikan atau masuk ke partai politik yang ada pada saat itu. Masyarakat Tionghoa atau yang sekarang lebih familiar disebut dengan Cina juga sangat antusias untuk terlibat aktif dalam ranah politik. Pasca reformasi para aktivis Cina mulai masuk ke partai politik, ada yang masuk di Golkar dan ada juga yang masuk di PDI. Pada perjalanan politiknya mereka dianggap sebagai pelengkap saja karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya peristiwa masa lalu (Orde Baru) selalu menghantuinya.

Pasca reformasi, etnis Tionghoa banyak yang menyalurkan pasrtipasi politiknya. Mereka menggunakan haknya sebagai warga Negara untuk bebas memilih dan beraktivitas politik. Banyak etnis Tionghoa yang terjun ke politik praktis dan juga mencalonkan sebagai anggota legislatif di kota Surabaya.

---

[7] Justian Suhandinata. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2009). 297

[8] Ibid.... 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada periode tahun 2004-2009 banyak calon legislatif dari etnis Tionghoa, tapi pada pemilu legislatif praktis hanya terpilih Baktiono dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mewakili etnis Tionghoa yang duduk di anggota DPRD Surabaya. Kemudian pada periode selanjutnya tahun 2009-2014 partisipasi politik etnis Tionghoa untuk menjadi anggota dewan di Surabaya mengalami eskalasi peningkatan, hal ini bisa dilihat dengan terpilihnya empat anggota dewan dari etnis Tionghoa.

Dari beberapa yang mencalonkan diri, terpilihlah beberapa anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa, yakni Simon Lukatumpesy (PDS) Wakil Ketua Komisi C bidang Pembangunan, Agus Santoso (P. Demokrat) Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya, Ernawati (P. Demokrat) anggota Komisi C bidang Pembangunan, dan Baktiono (PDIP) Ketua komisi D bidang Kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwasannya pasca Orde baru etnis Tionghoa memanfaatkan kebebasan untuk terjun ke ranah politik. Disamping itu peran etnis Tionghoa di DPRD Surabaya mendapatkan posisi penting pada wilayah struktural, seperti Agus Santoso yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan, Baktiono menjabat sebagai Ketua komisi D, dan Simon menjabat sebagai wakil ketua komisi C.

Stigma negatif pada masa lalu bagi etnis Tionghoa mencoba dihapuskan dengan cara menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat telah ditunjukkan etnis Tionghoa. Yang menjadi poin menarik dari semua ini adalah bagaimana partisipasi dan perpolitikan etnis Tionghoa yang duduk di anggota DPRD Surabaya. Maka dari itu peneliti mencoba untuk mendalami serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguak bagaimanakah politik yang dijalankan etnis Tionghoa di DPRD Surabaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etnis Tionghoa memanfaatkan peluang liberalisasi politik di Surabaya?
2. Apa motif etnis Tionghoa untuk terjun ke politik sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya?
3. Bagaimana performance etnis Tionghoa di DPRD Surabaya?

C. Tujuan

1. Untuk mengeksplorasi bagaimana etnis Tionghoa memanfaatkan peluang liberalisasi politik di Surabaya
2. Untuk mengidentifikasi apa yang menjadi motif etnis Tionghoa untuk terjun ke politik di Surabaya
3. Untuk mengetahui bagaimana performance etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas, diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan dan Manfaat Secara Teoritis

   Secara teoritis kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian ini akan menambah wawasan dalam disiplin ilmu politik, khususnya yang membahas tentang politik kaum minoritas Tionghoa di DPRD Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan dan Manfaat Secara Praktis

Secara praktis kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi khususnya masyarakat Tionghoa dan umumnya masyarakat luas terkait pandangan dan sikap politik etnis Tionghoa yang duduk di DPRD Surabaya. Dan juga diharapkan mampu untuk menjadi suatu contoh bagi khalayak umum untuk berpolitik seperti apa yang telah dilakukan para anggota DPRD Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa.

E. Penegasan Judul

Peneliti mencoba menjelaskan definisi dari konsep yang akan dibahas.

1. Liberalisasi politik

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah pandangan dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.[9]

2. Etnis Tionghoa

Menurut *Liem* etnis Tionghoa di Indonesia yaitu orang Indonesia yang berasal dari negara Tiongkok dan sejak generasi pertama/kedua telah tinggal di negara Indonesia, dan berbaur dengan penduduk setempat, serta menguasai satu atau lebih bahasa yang dipakai di Indonesia.[10] Sedangkan menurut *Suryadinata* istilah Tionghoa Indonesia digunakan merujuk pada etnis

[9] Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008). 480

[10] *WARTA INTI (Buletin Perhimpunan Indonesia Tionghoa)*, edisi 15 Februari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa yang tinggal di negara Indonesia yang memiliki nama keluarga (marga), tanpa memandang kewarganegaraannya.[11]

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.[12]

F. Kajian Pustaka

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga diharapkan dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjuatan yang telah dicapai. Hasil penulisan terdahulu tersebut antara lain:

No	Judul	Materi	Evaluasi
A	**Buku Refrensi**		
1	Ignatius Wibowo, dkk. Setelah Air Mata Kering (Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998), kompas, 2010	Membahas tentang aktivitas dan kegiatan etnis Tionghoa pasca reformasi	Pembahasannya lebih menekankan pada aspek budaya
2	Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia,* gramedia, 2009	Membahas tentang pengaruh etnis Tionghoa dalam ruang ekonomi dan politik	Kurang disebutkan secara terperinci terkait politik ala etnis Tionghoa

[11]Leo Suryadinata. *Negara dan Etnis Tionghoa.*(Jakarta: LP3ES, 2002). 41
[12] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1992), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism(Keberagaman Budaya dan Teori Politik), impulse kanisius, 2008	Membahas tentang kesetaraan, keadilan antar budaya, identitas nasional, kewarganegaraan, dan wacana politik budaya, yang keseluruhannya dibingkai dalam multikulturalisme.	Lebih membahas tentang multikulturalisme dalam segi teori politik, kurang membahas terkait multikulturalisme dalam aplikasi kehidupan bermasyarakat.
B	**Penelitian Terdahulu**		
1	Muyasaroh, *Studi Keberadaan Etnis Tionghoa Pada Masa Pemerintahan Orde Baru,*	Membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pada Orde Baru, serta kondisi sosial masyarakatnya.	Kebijakan-kebijakan yang dibahas masih sangat minim jika ditelaah lebih lanjut ketika Orde Baru berlangsung.
2	Kartini, *Partisipasi Politik Muslim Tionghoa di Surabaya; studi peranan PITI cabang Surabaya dalam pemilu 2004.*	Membahas tentang bagaimana partisipasi politik muslim Tionghoa serta bagaimana pula peranan PITI dalam pemilu	Kurang dijelaskan secara terperinci bagaimana peranan PITI dalam pemilu 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

		2004.	

Dari data diatas belum ditemukan penelitian terkait "Liberalisasi Politik Etnis Tionghoa". Maka dari itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dijadikan acuan agar pembahasan dari penelitian tersebut tidak sama dan tidak dianggap plagiat.

G. Metode Penelitian

Definisi

Metode penelitian atau metodologi adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi, penelitian dilakukan karena adanya hasrat manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapi, baik alam semesta ataupun sekitar[13].

Pendekatan dan jenis penelitian

Menurut Lexy J. Moeleong yang mengutip Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).[14] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan,

[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 2

[14] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dikaji.[15]

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.[16] Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat integral artinya bisa menangkap gejala-gejala secara utuh sehingga metode ini tepat untuk menggali data yang diharapkan oleh peneliti.
2. Dengan menggunakan menggunakan penelitian kulitatif ini kevaliditasannya data dapat diperoleh.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Surabaya dan difokuskan pada politisi yang berasal dari etnis Tionghoa yang menjadi anggota DPRD kota Surabaya. Diantaranya adalah Simon Lukatumpesy dari Partai Damai Sejahtera, Agus Santoso dan Ernawati dari Partai Demokrat, dan Baktiono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan memilih daerah Surabaya, pertama, etnis Tionghoa yang berada di Surabaya dianggap minoritas tapi mampu menempatkan empat wakilnya duduk di DPRD Surabaya. Kedua, peningkatan jumlah anggota dewan di Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa pada pemilu 2009 dan tersebar di

---

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta 2000), 20

[16] Koentjaraningrat: *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa partai, sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait politik etnis Tionghoa di Surabaya.

I. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan penggolongan sumber data berdasar kebutuhan, maka akan dibagi sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[17] Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian.

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data atau disebut juga yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak penelitian berdasar hasil informasi yang di berikan. *Informan-informan* yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga kategori, yang pertama dari politisi berlatar belakang etnis Tionghoa di DPRD Surabaya, antara lain: Simon Lukatumpesy (PDS), Agus Santoso dan Ernawati (P. Demokrat), dan Baktiono (PDIP). Yang kedua, politisi yang ada di kepengurusan

[17] Lexy J. *Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif,* 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai politik, pada poin ini diharapkan nantinya dapat mengetahui sepak terjang para politisi. Ketiga, etnis Tionghoa diluar anggota DPRD Surabaya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan Informan adalah orang-orang yang akan dipilih atau ditentukan secara proporsional dengan menggunakan teknik *purpossive sampling,* yakni teknik yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih bagi peneliti menurut ciri-ciri spesifik dimiliki oleh sampel itu. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan data.[18]

Selain anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa, informan tambahan dalam penelitian ini yakni masyarakat Tionghoa yang bukan anggota dewan. Hal ini dilakukan karena dengan menggali informasi dari mereka, kita dapat mengetahui bagaimana perspektif politik menurut masyarakat Tionghoa yang bukan terjun ke politik praktis. Teknik yang digunakan adalah dengan memilih masyarakat Tionghoa yang mengetahui atau terlibat pada peristiwa Orde Baru.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal–hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, *browsing* data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah orang diluar partai dan lawan politik etnis Tionghoa di DPRD Surabaya.

---

[18] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data diperlukan suatu teknik untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.[19] Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati secara langsung dan cermat terhadap perilaku individu. Karena dengan teknik ini segala tingkah laku dan aktivitas subyek penelitian sehari-sehari bisa diketahui, sebab dengan observasi merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran.

Dalam observasi ini dibutuhkan kamampuan peneliti secara optimal baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebebasan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk dapat berpartisipasi di tempat lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peran aktif peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sejalan dengan hak tersebut, peneliti terlibat langsung dalam penelitian.

Langkah yang diambil pada tahap ini adalah melakukan pengamatan terhadap anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa di DPRD Surabaya. Yang menjadi bahan pengamatan, diantaranya : apa motif mereka terjun ke politik praktis, dan bagaimana kinerja anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa di DPRD Surabaya.

---

[19] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet. I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan yang utama. Untuk itu wawancara sangat penting dalam penelitian ini. Metode ini mengajukan pertanyaan secara langsung dengan informan yang diharapkan mendapat penjelasan pendapat, sikap dan keyakinan tentang hal-hal yang relevan dalam penelitian.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau *informan* dengan mengunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara) untuk secara detail dan mendalam.

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara etnografi, dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal, wawancara ini bersifat luwes susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya.[20]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur untuk memperoleh data. Dengan cara ini peneliti bisa mengembangkan pertanyaan dan

[20] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2008), 180-181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disesuaikan dengan kondisi saat wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang memahami keadaan dan kondisi yang sedang diteliti. Hal ini di lakukan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara peran informan tetap menjadi sentral walaupun kadang informan berganti-ganti. Tugas peneliti (pewawancara) adalah untuk tetap menjaga agar peran informan dapat berfungi sebagaimana perannya dalam proses sosial yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menelusuri setiap data literatur, yaitu bahan-bahan yang diterbitkan, menjadi literatur atau sebagai buku bacaan dan data yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, seperti: buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan sebagainya.

Dokumentasi disini adalah semua jenis rekaman atau catatan sekunder sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan di lapangan, baik bersifat resmi maupun pribadi yang di maksudkan untuk menambah pembendaharaan data suatu penelitian.

K. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Metode analisa kualitatif Versi Matthew B. Miles & A. Michel Huberman sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasara yang di peroleh lapangan studi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan menjadi pernyataan, penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif.

Ketiga, Verifikasi penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diprolehnya di lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar di peroleh konklusi yang valid dan kokoh.[21]

L. Teknik Pengabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan Patton mendefinisikan triangulasi adalah sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa dengan orang yang bukan dari etnis Tionghoa.

---

[21] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* (Jogdjakarta: 2006) . 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis dalam bentuk bab per bab, dan antara satu bab dengan bab yang lain terdapat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun kerangka jelasnya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kerangka teori

Bab ketiga Setting penelitian membahas tentang gambaran umum obyek penelitian mulai dari keadaan geografis dan demografi (sosial, politik, ekonomi, dan budaya) etnis Tionghoa di Surabaya

Bab keempat yaitu penyajian dan analisis data .

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Kerangka Teori

A. Konsep Liberalisasi politik

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah pandangan dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga Negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.[1]

Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Paham liberalisme banyak bicara mengenai kebebasan, gagasan tentang negara konstitusional yang dilandaskan pada kedaulatan hukum dalam demokrasi, perlindungan atas hak milik pribadi dalam praktek kapitalisme modern, serta perlindungan atas kebebasan individu melalui gagasan besar tentang civil liberties kesemuanya adalah bagian dari kebajikan umum yang lahir dari filsafat liberal.

Pasca runtuhnya rezim politik orde Baru-nya Suharto yang otoriter di tahun 1998. Indonesia, kemudian memasuki masa Reformasi, yang lantas disebut juga "Orde Reformasi". Orde Reformasi dicirikan dengan terjadinya apa yang

---

[1]Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008). 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh O'Donnell dan Schmitter disebutnya fase "liberalisasi politik". Fase ini secara teoritis sebagai fase transisi dari otoritarianisme entah menuju kemana". Yang disebut liberalisasi disini adalah proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Liberalisasi politik awal pasca Orde Baru ditandai antara lain terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat.

Ketika Orde Baru tumbang, setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng oleh negara. Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran akar rumput (grass root), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktek penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit di ditandai dengan maraknya pendirian partai politik.

Liberalisasi politik ditandai dengan proses masa transisi yakni tentang peralihan kekuasaan dari rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto ke model demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru. Rezim terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Seseorang yang bertindak atas tanggung jawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberalisme inilah, *John Stuart Mill* mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal.[23]

Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakala mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat keputusan yang lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimanapun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik-buruknya keputusan tersebut.[24]

Adapun ciri-ciri dari ideologi liberal adalah:

1) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik
2) Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers
3) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar untuk membuat keputusan sendiri
4) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Karena itu pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan

[23] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1992). 35
[24] Ibid...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan, dan karena itu sejauh mungkin dibatasi

5) Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal[25]

Liberalisme juga dipandang sebagai doktrin yang maknanya semangat individualisme. Setiap individu dihargai kebebasannya dalam ekonomi, politik, hukum, budaya, dalam Negara, yang dikemas dalam istilah kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan. Dalam pemikiran ini sebuah masyarakat yang terbaik (rezim terbaik) adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan.[26]

Menurut Puntsch, ada beberapa nilai-nilai liberalisme, yaitu :

1. Kebebasan: kebebasan yang berganda. Kemerdekaan dari paksaan luar dan yang tidak patut bagi manusia, dan kemerdekaan dari paksaan diri sendiri yang sama sekali tidak patut, jadi maknanya, bertindak dengan cara rasional

---

[25] Ibid...

[26] Efriza, *Ilmu Politik (dari ilmu politik sampai sistem pemerintahan)*, (Bandung: Alfabeta, 2008). 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanggung jawab, merupakan dasar kewajiban masing-masing pada masyarakat umum dan membatasi hak-hak dirinya terhadap maupun didalam masyarakat itu.
3. Mewujudkan diri sendiri, berarti pengembangan kepribadian. Pengembangan bakat dan penegembangan kemampuan keterampilan dan cara bertindak.
4. Hak untuk menentukan diri sendiri, adalah cara dan tindakan dalam rangka mempertahankan kebebasan itu.
5. Turut menentukan, manusia itu bukan hanya menjadi makhluk yang berdiri sendiri, tetapi ia sekaligus menjadi anggota berbagai kumpulan, seperti keluarga, jemaat, klub, partai, Negara. Keanggotaan ini memberikan pada dirinya hak untuk turut menentukan.
6. Toleransi, berarti mengakui hak menentukan sendiri dan hak turut menentukan yang dimiliki oleh orang lain, atau menghormati kebebasan bersama.
7. Menyeimbangkan, kesempatan-kesempatan kewajiban untuk mengurangi perbedaan dalam kondisi kehidupan, untuk menyamaratakan kesempatan.
8. Pertolongan agar bisa menolong diri sendiri. Ingin menolong warga Negara yang kurang beruntung agar bisa berdiri sendiri diatas kaki sendiri dan menjadi mampu untuk hidup mandiri.
9. Pluralisme, menghargai adanya keanekaragaman pendapat serta kepentingan, bentuk-bentuk pencarian nafkah dan bentuk-bentuk kehidupan, penawaran, dan permintaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Kemajuan, sebagai langkah yang tak terhindarkan dalam perjalanan menuju pada suatu bentuk masyarakat yang layak terhadap umat manusia.
11. Demokrasi, suatu sistem hak-hak turut menentukan secara politis. Demokrasi memungkinkan peran warga Negara untuk berpengaruh pada keputusan politik.
12. Federalisme dan desentralisasi, keinginan untuk menyerahkan hak untuk memutuskan pada unit administratif yang rendah, pada unit organisasi terkecil yang masih mampu memutuskan adalah sesuai dengan prinsip itu.
13. Alam dan lingkungan hidup, hanya alam yang sehat dan lingkungan hidup yang memungkinkan seseorang bisa mengembangkan kepribadiannya. Lingkungan hidup yang hancur menghambat upaya mewujudkan diri sendiri dan membatasi kemungkinan pengembangan bakat sehingga menjadi kemampuan.
14. Perdamaian dan pemanfaatan nilai dasar liberalisme, kebebasan, tanggung jawab, hak menentukan sendiri, toleransi didalam politik luar negeri.[27]

Dari berbagai nilai-nilai diatas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang kebebasan, pluralisme, dan demokrasi. Alasannya adalah, kebebasan yang identik dengan kemerdekaan dalam hal pola pikir dan tindakan mampu mengekspresikan karya manusia. Serta pluralisme sebagai penghargaan untuk keanekaragamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga semangat demokrasi yang tumbuh diharapkan mampu mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

---

[27] *Ibid* hal 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Pluralisme Politik

Pluralisme adalah suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga tercegah terjadinya suatu kelompok mendominasi kelompok lain. Sistem ini beranggapan keputusan politik yang penting lebih dapat dipengaruhi secara efektif melalui kelompok yang terorganisasikan secara baik.[28]

Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (many); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Artinya dalam Negara pluralis Negara tidak lagi bersifat homogen, seperti yang diungkapkan Dwight King melihat peran Negara di masa Orde Baru begitu dominan, yang ditandai dengan adanya institusi yang lebih bersifat kooptatif sehingga kekuatan masyarakat menjadi tidak berdaya menghadapi pembatasan pluralitas yang dilakukan oleh Negara. Kooptasi tersebut dicapai dengan cara menciptakan dan mengendalikan pluralitas kekuatan masyarakat tersebut melalui pembentukan jaringan kelompok-kelompok korporatis.[29]

Dalam konsep pluralisme setiap individu mempunyai hak dan kepentingan terbuka, dimana setiap individu bebas berekspresi dan berkreasi terhadap apa yang dimilikinya. Pasca reformasi, sebagai perwujudan dari pluralisme dan partisipasi politik, para elit politik berlomba-lomba mendirikan kembali partai politik, sehingga jumlah partai politik banyak. Klimaks dari pendirian partai politik adalah diselenggarakannya pemilu di tahun 1999. Inilah pemilu pertama pasca

---

[28] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1992), 102
[29] Dikutip dari Tesis Laili Bariroh, *Politik Dalam Birokrasi*, (Yogyakarta, 2004), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orde Baru dan pemilu kedua setelah pemilu 1955, yang oleh para pengamat asing disebut sebagai pemilu paling bersih.

Pluralisme mengharuskan adanya berbagai asosiasi yang bersaing yang tidak disponsori ataupun dimanipulasikan oleh pemerintah. Pemerintah harus tanggap terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat, dan politik pada dasarnya merupakan persaingan kelompok-kelompok kepentingan untuk memperjuangkan agar kebijakan yang mereka kehendaki dijadikan sebagai keputusan politik oleh pemerintah.[30]

Dalam paham kemajukan, pluralisme menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan dengan demikian membentuk hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka; misalnya, mengenai kapan suatu kenaikan dalam jumlah atau keefektifan lingkup keterlibatan politik mengubah secara berarti tingkat pemusatan pengambilan keputusan, pertanggungan, dan aspek-aspek lain pembuatan kebijaksanaan pemerintah.[31]

Dari sudut pluralisme, politik dipandang sebagai proses interaksi yang memungkinkan untuk terlibat mempengaruhi jalannya kebijaksanaan. Pandangan ini menampilkan dua pertanyaan mendasar yang telah menjadi perhatian kaum pluralis. Pertanyaan pertama adalah masalah non-partisipan, yaitu warga Negara yang berinteraksi yang dikesampingkan atau mengesampingkan dirinya dari proses itu. Pertanyaan kedua, yang dapat dinamakan paradoks pluralis, menyangkut partisipasi yang terlalu banyak. Tingkat partisipasi berbagai

---

[30] Ibid..
[31] David Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok yang sangat tinggi dapat melumpuhkan para pembuat kebijaksanaan jika dan ketika keputusan mengenai isu penting yang manapun mengganggu terlalu banyak kepentingan.[32]

Dalam hal pertama mungkin juga terjadi bahwa dalam pemungutan suara, bagaimanapun juga, ada sedikit perbedaan yang berarti anatara pemilih dan bukan pemilih dalam hal sikap, keyakinan, dan pilihan. Dalam hal kedua, sudah tentu benar bahwa partisipasi memperbesar demokrasi. Tetapi ia juga memperbesar kebutuhan akan kordinasi dan kontrol. Semakin banyak orang berpartisipasi dalam proses politik, dan semakin bermacam-macam cara partisipasi itu semakin banyak persaingan diantara kelompok-kelompok.[33]

Secara ringkas dapat dijelaskan beberapa karakterisitik pluralisme sebagai suatu sistem perwakilan kepentingan. Pertama, setiap kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama karena kesamaan suku, ras, dan agama maupun kesamaan profesi, dan kegemaran berhak membentuk asosiasi yang dikehendaki tanpa campur tangan pemerintah atau kelompok lain. Suatu jenis kepentingan dapat saja diperjuangkan oleh lebih dari satu asosiasi yang masing-masing bersifat otonom. Kedua, keanggotaan asosiasi bersifat sukarela, dan seseorang dapat saja menjadi anggota dari berbagai asosiasi kepentingan. Ketiga, pemerintah tidak mencampuri urusan kelompok kepentingan, melainkan bertindak sebagai wasit untuk memelihara aturan permainan yang sehat bagi persaingan di antara kelompok kepentingan dan bersikap tanggap terhadapnya. Keempat, para anggota asosiasi itulah yang berwenang menentukan pemimpinnya dan merumuskan

---

[32] Ibid..
[33] Ibid...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang hendak diperjuangkan kepada pemerintah. Kelima, keputusan di dalam organisasi dan dalam berinteraksi dengan organisasi lain dicapai dengan perundingan, tawar-menawar, dan kompromi.[34]

Di dalam pernyataan Robert Dahl tentang pluralist democracy (demokrasi pluralis). Pertama, istilah-istilah pluralisme atau pluralist mengacu pada pluralisme organisasi, yaitu adanya pluralitas sebagian besar organisasi atau subsistem yang secara relatif bersifat otonom di dalam wilayah sebuah Negara. Kedua, di dalam semua Negara demokratis beberapa organisasi penting relatif otonom. Ketiga, sebuah Negara disebut demokrasi pluralis jika ia merupakan demokrasi dalam arti poliarki dan organisasi-organisasi penting lainnya relatif bersifat otonom. Selanjutnya semua Negara demokratis merupakan demokrasi pluralis.[35]

Segi model pluralis, pluralisme meluaskan teori liberal mengenai pasar politik. Pengertian persaingan individual digantikan oleh suatu jaringan persaingan, pengaruh, pertanggung jawab dan informasi organisasi, dalam mana kelompok dapat mengorganisir dan dengan melaksanakan hak-hak, mewujudkan kepentingan untuk mempengaruhi hasil kebijaksanaan. Stabilitas sistem pluralis didasarkan pada : pertama, pemeliharaan kaidah-kaidah konsensus. Kedua, perubahan nilai menjadi kepentingan melalui persaingan organisasi. Ketiga, semakin mempersiapkan masyarakat menuju persamaan. Keempat, perkiraan

---

[34] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,..... 103
[35] Robert Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan kepentingan menjadi nilai melalui mereka yang relatif tidak memiliki kekuasaan.[36]

C. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Gabriel A. Almond mencoba mengungkapkan secara garis besar bentuk-bentuk partisipasi politik yang pernah digunakan di berbagai Negara. Dari berbagai bentuk sempat di inventarisasi kemudian diklasifikasikan dalam dua pola yang umum sifatnya. Pertama, pola konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik berdasarkan kondisi dan tata cara menurut adat (peraturan setempat) yang dianggap umum dan berlangsung dalam demokrasi modern. Kedua, pola partisipasi politik non konvensional merupakan beberapa bentuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.[37]

Untuk merealisasikan hak berpartisipasi dalam politik, masyarakat dan Negara mengembangkan berbagai wadah mulai dari kelompok kepentingan,

---

[36] David Apter, *pengantar Analisa Politik*, 308
[37] Khoirul Anwar, *Perilaku Partai Politik*, (Malang: UMM Press, 2006), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ormas, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat sampai kepada sistem perwakilan politik yang otonom dan fungsional. Selain dari itu, kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik terbuka luas bukan saja karena sumber daya politik terdistribusi secara relatif, akan tetapi juga karena terbukanya akses masyarakat luas terhadap saluran dan mekanisme komunikasi politik. Maka kegiatan partisipasi politik masyarakat bukan saja di dalam pemilu, akan tetapi melebar kepada lobby dengan pejabat pemerintah dan wakil rakyat di lembaga perwakilan.[38]

Menurut Paige, membedakan partisipasi menjadi empat tipe. Pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah maka disebut militan radikal. Keempat, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).[39]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Yang termasuk partisipasi aktif (kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik) adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan,

---

[38] Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8
[39] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Yang termasuk partisipasi pasif ialah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah, seperti pada saat pemilihan umum. Bentuk-bentuk dari partisipasi politik antaran warga negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Tinggi rendahnya partisipasi tersebut karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah. Selain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Fungsi partisipasi politik yaitu menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan, mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan, mengawasi proses politik, serta partisipasi politik dimanfaatkan sebagai mekanisme beroperasinya nilai moral di dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara.[40]

Russel Dalton dalam surveinya berkaitan dengan perubahan sosial mutakhir mengenai partisipasi politik, mengidentifikasikan lima kecenderungan terkini dari partisipasi politik di Negara demokrasi liberal, yakni:

a. Meningkatnya warga Negara yang kritis dan melek informasi
b. Terjadinya penurunan kepercayaan terhadap elit-elit politik dan lembaga-lembaga politik
c. Semakin menurunnya loyalitas kepada partai politik tradisional
d. Terjadi penurunan pemilih dalam pemilu

[40] Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peningkatan dalam partisipasi politik yang non konvensional[41]

D. Konsep Perilaku politik

Budaya politik seseorang akan menentukan perilaku politiknya, sehingga untuk menjelaskan perilaku politik seseorang, terlebih dahulu harus diketahui sejauh mana tingkat orientasi seseorang terhadap sistem politiknya. Dengan kata lain, perilaku politik dapat dipahami melalui pengetahuan kita terhadap budaya politik seseorang. Sementara itu dengan menggunakan kerangka pembagian perilaku sebagaimana dinyatakan oleh Weber, perilaku seseorang dapat dibedakan dari tingkat rasionalitasnya.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologis disamping pendekatan structural fungsional dan structural konflik. Berikut ini akan diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.

Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.

---

[41] Khoirul Anwar, *Perilaku Partai Politik*, (Malang: UMM Press, 2006), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin terwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman segala bentuknya.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : "Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih *(to vote or not to vote)* didalam suatu pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum (Pilkada secara langsung).[42] Perilaku Pemilih dapat dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokkan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.[43] Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, Jenis kelamin, umur, dan, sebagainya) merupakan faktor penting dalam menetukan pilihan politik.[44]

Dari karakteristik sosial tersebut akan terbentuk kelompok-kelompok sosial yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang melalui persepsi, pembentukan sikap, dan orientasi. Telah dikemukakan bahwa subkultur (kelompok sosial) tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. Kognisi yang sama antar anggota subkultur tersebut terjadi sepanjang hidup dengan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosio kultural yang sama pula. Dengan itu anggota subkultur tersebut memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang sama, termasuk juga dalam hal preferensi politik.

---

[42] Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilih dan Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 170

[43] Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih,1955-2004,*(Surabaya : Pustaka Eureka, 2006), 138

[44] Ibid...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis menjelaskan perilaku memilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi.[45] Proses sosialisasi ini yang nantinya dapat membentuk sikap individu dan akan mempengaruhi perilaku memilih.

Mengapa sikap ini dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, yang menurut Greenstein mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.[46]

Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak calon pemilih masih berusia dini. Mulai dari usia dini tersebut pemilih mendapatkan pengaruh berupa padangan politik orang tuanya. Kemudian setelah beranjak dewasa, pengaruh pandangan politik tersebut membentuk sikap yang mantap setelah pemilih bergabung dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di

---

[45] Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku*....., 141
[46] Ibid., 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitarnya. Misalnya pengajian, ormas, atau partai politik. Proses panjang tersebut akhirnya memperkuat ikatan antara individu dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan yang seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai.

E. Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional menekankan semua orang untuk memilih dengan apa yang dikehendakinya, tentunya dengan pertimbangan tertentu. Tidak ada wilayah pembatasan atau pengekangan untuk memilih sesuatu yang akan dijadikan pilihannya. Dalam teori pilihan rasional, Buchanan mengatakan, adalah sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Sebagai contoh, jika seorang anggota DPRD melihat jalan-jalan di kotanya rusak, sehingga ia tak nikmat menyetir mobil, dan lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat umum di kota itu. Jika demikian yang terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan adanya motivasi kepentingan pribadi dalam diri politikus.

Weber menggunakan konsep Rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe – tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut weber pertimbangan sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. weber membagi Rasionalisme tindakan kedalam 4 macam, yaitu *rasionalitas instrumental,rasionalitas yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berorientasi nilai, tindakan Tradisional, dan *tindakan Afektif.* Rasionalitas instrumental sangat menekankan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan dengan adanya pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam melakukan tindakan sosial. Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat – alat hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan – tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai – nilai individu yang bersifat absolut atau nilai akhir baginya.

Pertama, Tindakan Rasional Instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya guna pemenangan dalam pemilu, mereka giat berkampanye. *Kedua, Tindakan Rasional Berorientasi Nilai.* Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Misalnya masyarakat bebas memilih partai yang disukainya. *Ketiga, Tindakan Tradisional.* Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. *Keempat, Tindakan Afektif.* Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa.

F. Etnis Tionghoa

Pasca reformasi bergulir angin segar menaungi setiap kelompok yang terkekang pada saat Orde Baru berlangsung, salah satunya adalah kelompok Tionghoa. Bagi etnis Tionghoa, reformasi menjadi keran pembuka untuk menyalurkan segala ide/gagasan yang selama ini harus 'puasa' ketika orde baru berlangsung. Salah satu bentuk kongkrit adalah terjun ke dunia politik, untuk memperjuangkan kelompoknya dan meraih kembali hak-hak konstitusionalnya mereka harus terlibat langsung ke dunia politik.

Aktivisme politik Tionghoa terjadi pasca Orde Baru, hal ini terjadi karena situasi krisis yang dialami Tionghoa. Aktivisme dalam pandangan **Wibowo** terbagi dalam beberapa bentuk. *Pertama,* melalui tuntutan untuk mendapatkan pengakuan dan tempat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tampak dari upaya orang Tionghoa untuk menulis kembali sejarah nasional karena Orde Baru telah menyisihkan orang Tionghoa dari memori kolektif bangsa Indonesia. *Kedua*, perjuangan menuntut kembali hak-hak yang terjadi sesudah atau berbarengan dengan perjuangan pengakuan tempat dalam sejarah. Langkah yang lebih praktis ini dilakukan melalui pendirian organisasi-organisasi yang secara langsung memperjuangkan penghapusan produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. *Ketiga,* melalui kehadiran politisi Tionghoa dalam kampanye pemilu yang juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menampilkan visibilitas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan kata lain untuk memberikan kontribusi positif bagi perubahan citra negatif yang selama ini diletakkan pada mereka.[47]

Kehadiran orang Tionghoa dalam pentas politik nasional sempat diragukan oleh **Benny Setiono**, ketua perhimpunan INTI Jakarta, melontarkan semacam sindiran bahwa orang Tionghoa yang terjun dalam bidang politik pada umumnya menduduki "nomor sepatu", yang berarti mereka tidak mungkin akan terpilih dan menjadi legislator. Kata Benny lagi, orang-orang tionghoa diikutsertakan dalam pemilihan umum untuk menarik pemilih dari orang Tionghoa, dan juga dana mereka untuk mendukung kampanye yang tidak murah. Jika benar ini yang terjadi, para politikus Tionghoa yang ikut terlibat dalam kampanye pemilihan umum pada dasarnya tidak berbeda dari politisi lain, malah mungkin hanya sekedar meramaikan saja.[48]

Meski demikian, kehadiran politisi Tionghoa dalam kampanye-kampanye selama pemilihan umum dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menampilkan visibilitas, maksudnya adalah menunjukkan keberadaan etnis Tionghoa dalam dunia politik. Karena sudah sedemikian lama orang Tionghoa dikucilkan dan lenyap dari panggung politik Indonesia, menjadi sangat menarik bahwa banyak orang "bermata sipit" yang kelihatan dalam kampanye. Mereka tampil di panggung-panggung terbuka dan ikut berpidato dengan berapi-api. Hal ini sangat penting untuk dilihat oleh banyak orang, entah mereka yang menyaksikan langsung atau melihatnya lewat televisi. Orang akan melihat bahwa orang-orang Tionghoa ternyata tidak hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri,

---

[47] Wibowo, Thung Ju Lan (ed). *Setelah Air Mata Kering*. (Jakarta: Kompas, 2010), 16-17
[48] Ibid,,,,41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga peduli terhadap nasib bangsa dan Negara. Dalam arti ini, terjunnya orang Tionghoa dalam kampanye politik dapat dikatakan memberikan kontribusi positif bagi perubahan citra negatif yang selama ini diletakkan pada mereka. Secara tidak langsung, mereka telah ikut berjuang dengan rekan-rekan mereka di medan yang lain.

Dengan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwasannya secara politik orang Tionghoa mampu untuk melakukan aktivitas politik seperti pada umumnya, hanya saja sebagian besar orang Tionghoa juga masih beranggapan bahwa perlakuan diskriminatif pada masa Orde Baru memaksanya untuk mengabaikan segala sesuatu yang berurusan dengan politik atau yang dikenal dengan istilah apolitik. Maka dari itu, orang Tionghoa sangat enggan bersinggungan dengan politik, mereka lebih memilih wilayah ekonomi dan bisnis. Hasilnya, orang Tionghoa secara ekonomi mayoritas berkecukupan. Tapi tidak semua bersikap seperti itu, misalnya Kwik Kian Gie menjadi salah satu contoh orang Tionghoa yang berhasil dalam segi ekonomi dan politik. Beliau menjadi menteri pada periode Gus Dur dan Megawati. Keberhasilan Kwik untuk terjun kedunia politik diharapkan menjadi contoh bagi orang-orang Tionghoa agar lebih partisipatif dan peka terhadap perpolitikan di Indonesia, sehingga nantinya dapat memunculkan kwik-kwik yang lain dari orang Tionghoa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa. Di Surabaya terdapat empat anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa, diantaranya: Agus Santoso, Baktiono, Ernawati, dan Simon Lekatumpessy. Untuk mendapatkan data tambahan, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang berasal dari etnis Tionghoa-non anggota dewan, dan juga para politisi lain untuk menilai bagaimana performance anggota dewan di DPRD Surabaya.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik tidak lepas dari dinamika politik tanah air. Pasca Orde Baru demokrasi terbuka lebar bagi setiap kalangan untuk melakukan aktivitas diranah publik atau politik. Hal ini juga dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa untuk menyalurkan ide serta gagasan politiknya yang kemudian diaktualisasikan pada aktivitas politik. Keterlibatan etnis Tionghoa di Surabaya tidak terlepas dari dinamika politik yang ada di Surabaya, selain itu nilai ekonomi, sosial politik, dan budaya juga menjadi suatu bagian yang tidak bisa terlepaskan bagi masyarakat Tionghoa. Berikut ini penjelasannya :

A. Aspek Ekonomi

Keberadaan masayarakat etnis Tionghoa di Indonesia termasuk di Surabaya telah terjadi sejak berabad-abad lalu. Sebelum orang Belanda datang ke Indonesia, hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa Timur telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjalin terutama sekali bila dikaitkan dengan aspek ekonomi-perdagangan. Bukti-bukti tentang keberadaan dan hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat Jawa dicatat dalam buku Ying_Yai Sheng_Lan.[49]

Berdasarkan catatan-catatan yang ditulis oleh Ma Huan yang dikutip oleh W.P. Groeneveld dalam karyanya Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Source (1960) dikatakan : Di SU_LU_MA_I (Surabaya) juga mempunyai penduduk kurang lebih seribu kepala keluarga, sebagian diantaranya orang Tionghoa. Sedang Man-Che-Po-I (Majapahit) terdapat kurang lebih bangsa asing, kebanyakan orang-orang Tionghoa berasal dari pusat kerajaan Tiongkok. Dan di Jawa Timur terdapat tiga golongan bangsa. Pertama, orang-orang Islam datang dari kerajaan asing yang terletak di sebelah barat dan telah datang ke Majapahit sebagai pendatang. Kedua, orang-orang Tionghoa yang berasal dari provinsi Kuang-Tung, Chang Chou, Chuan-Chou, dan daerah-daerah lain yang semacam itu, yang telah melarikan diri dari daerah-daerah mereka. Diantara mereka telah memeluk Islam, mengerjakan sembahyang dan puasa. Ketiga, orang-orang pribumi yang berambut kusut dan masih memuja hantu.

Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Melly G. Tan, bahwa merupakan suatu kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia, akan kehadiran dan keberartian orang-orang etnis Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Indonesia.[50] Pernyataan ini mempunyai makna, pertama, kehadiran orang-orang

---

[49] Buku Ying_Yai Sheng_Lan merupakan perjalanan Ma Huan dalam kunjungannya ke negeri-negeri selatan (asia tenggara). Salah satu negri yang dikunjungi adalah Indonesia. Ma Huan adalah juru tulis Ma Cheng-Ho. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur Ma Huan mencatat daerah-daerah yang dikunjunginya.

[50] Chee-Bang, Tan, *Cina Baba, Cina Non Baba dan Melayu : sebuah catatan interaksi etnis di Malaka,* dalam prisma No 11 Tahun. X.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa di Indonesia termasuk Surabaya telah berlangsung beberapa generasi dan telah berabad-abad lalu, sedangkan keberartian mempunyai makna yang tidak dapat diukur dari perlakuan masyarakat terhadap mereka, ada yang acuh tak acuh. Malahan cenderung ekstrim, menyenangi atau bahkan membenci. Kedua, bahwa suatu golongan tidak merupakan kelompok mayoritas untuk mempunyai kedudukan dan posisi yang berarti dalam masyarakat. Memang apabila dilihat jumlah penduduk Surabaya yang besar tidak akan sebanding dengan jumlah kelompok minoritas Tionghoa. Tetapi jumlah yang kecil ini telah mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi dan peranan yang cukup penting terutama dibidang perekonomian dan perindustrian.

Jika kita flashback kebelakang, sekilas penjajah memanjakan etnis Tionghoa dengan memberikan fasilitas dan monopoli atas komoditi atau kegiatan ekonomi tertentu seperti opium dan pegadaian. Etnis Tionghoa memang banyak mengambil untung dari kebijakan tersebut. Namun pada saat berbarengan penjajah memberlakukan orang Tionghoa lebih keras dibanding pribumi. Kelompok pribumi misalnya, yang menempati strata paling bawah, memiliki kebebasan untuk pergi dan tinggal bila hendak bepergian. Oleh karenanya identifikasi etnis Tionghoa menjadi sulit ditentukan.

Secara formal kedudukan keturunan Tionghoa di masa Orde Lama lebih marjinal dibandingkan kedudukan mereka di zaman Orde Baru. Pemerintah Orde Lama dengan tegas memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kelompok Tionghoa sebagaimana tercermin dalam PP.No.10, dimana aktivitas Tionghoa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi sampai kotamadya atau kabupaten.[51] Di zaman Orde Baru diskriminasi seperti ini tidak muncul, namun secara informal sikap membedakan terhadap etnis Tionghoa masih juga terasa. Di satu sisi, Orde Baru member peluang ekonomis yang demikian besar terhadap etnis Tionghoa, sehingga tercipta banyak konglomerat, tetapi tidak banyak memberikan ruang politik bagi mereka. Meskipun secara hukum kedudukannya sama seperti bangsa Indonesia lainnya, dalam kenyataannya mereka tetap dibedakan.

Pola ekonomi yang dianut oleh etnis Tionghoa Surabaya dewasa ini adalah campuran yang tidak teratur antara Tradisionalisme Tionghoa, Kapitalisme, dan Imperialisme.

C.*1. Pola Tradisionalisme*

Pola ini lebih banyak dipengaruhi masa kolonial Belanda hingga menjelang kemerdekaan dan periode ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1) Golongan imigran yang dating ke Indonesia yang lebih berorientasi ke negeri Tiongkok sebagai negeri leluhurnya. Golongan tetap berbahasa Tionghoa dan masih teguh mempertahankan nasionalisme (fanatisme).
2) Golongan yang didatangkan penjajah dengan ikatan kontrak oleh pemerintah kolonial Belanda. Golongan ini lebih berorientasi ke Eropa, dalam konteks ini adalah Belanda. Mereka umumnya

[51] Tarmizi Taher, *Mentalitet Cina dan Pribumi (sebuah perbandingan dalam masyarakat Cina),* (Jakarta: Censis, 1997), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pendidikan di Hogere Burger School (H.B.S), bahkan ada yang sampai di perguruan tinggi di negeri Belanda. Mereka umumnya masuk Cina Hwe, yang diantaranya ada yang berbahasa Belanda.

3) Golongan Tionghoa peranakan, yang lebih banyak terbentuk pada masa kemerdekaan. Dari segi kuantitas, golongan ini merupakan yang terbesar dibandingkan dua golongan diatas. Mereka ini berada di lapisan bawah dalam struktur sosial masyarakat Tionghoa. Mereka ini tidak sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Dalam kesehariannya, mereka tidak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, sedang di Bali mereka berbahasa Bali atau mereka berbahasa Melayau.[52]

Pada masa kemerdekaan telah tercapai dan keadaan menjadi aman, keberadaan orang Tionghoa sebagai perantara/penyalur perdagangan antara Belanda-Pribumi semakin memantapkan eksistensinya di bidang perdagangan dan perekonomian. Dengan demikian dalam sejarah perkembangan masyarakat dan Negara Indonesia telah memberikan kesempatan dan keuntungan nasib baik bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia, sehingga mereka mampu menguasai di bidang perekonomian. Selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kolonial untuk mengembangkan kemampuan ekonomi dan juga kepandaian mereka memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi pribumi yang mengalami stagnasi ternyata juga didukung oleh semangat usaha dan etos kerjanya tidak bisa lepas dari

[52] M.D, La Ode, *Tiga Muka Etnis Cina di Indonesia (fenomena di Kalimantan Barat, perspektif ketahanan nasional)*,(Yogya: Biggraf publishing, 1997), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan dan pandangan hidupnya yang erat kaitannya dengan kultural orang-orang Tionghoa yang berorientasi pada kultur leluhurnya.

Dekripsi diatas menunjukkan adanya benang merah antara kesuksesan dan keberhasilan perekonomian etnis Tionghoa disebabkan banyak faktor yang kompleks dan saling terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Kajian secara seksama menunjukkan, memang ada benang merah dibalik sikap dan pandangan hidup masyarakat etnis Tionghoa, yakni mereka dipengaruhi ajaran moral Konghucu. Dalam ajaran Konfusius dikatakan bahwa ada hubungan segitiga dan tidak bisa lepas antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut adalah Konfusius, keluarga, dan kerja yang didalamnya terdapat nilai San Pau (Tiga Mustika) yang esensial pada penjagaan harmoni diantara ketiganya.

Fokus utama perhatian ajaran Konfusius pada prinsipnya terletak pada lembaga keluarga (sebagai lingkup terkcil dalam negara). Dari asas harmoni ini dapat dilihat adanya pertalian langsung dengan sikap bawaan dalam konteks penyelenggaraan bisnis. Mereka yang mengacu asas ini sebagai nilai positif dalam tingkah laku bisnisnya akan memunculkan sikap yang jauh dari individualistis dan lebih dekat pada kolektivitas. Hal ini bisa melahirkan team work dalam berbagai tingkatan, bisa dalam lingkup keluarga tapi tidak tertutup kemungkinan lebih luas seperti dalam perusahaan atau perkongsian namun tetap dalam prinsip satu keluarga. Hal ini hampir menjadi ciri manajemen konglomerat di golongan mereka.

C.2. Pola Kapitalisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwa kapitalisme orang-orang Tionghoa adalah realitas dari latar belakang etnosentrisme sebab akibat, dengan membina pola hidup eksklusivisme yang didasari tipe sikap, introverisme, dan leluhur. Cara hidup eksklusivisme yang menolak pola adaptasi dengan unsur-unsur budaya asli yang ada di luarnya, membangkitkan Jiwa Kapitalisme orang Tionghoa. Pola hidup eksklusivisme sebagai sebab dan antitesa kultural dari suku asli sebagai akibat. Oleh karena orang Tionghoa sebagai golongan minoritas dan golongan pribumi adalah golongan mayoritas.

Dari pengalaman psikologis seperti itulah, mereka melahirkan rasa solidaritas sesama orang Tionghoa di segala sektor kehidupan khususnya di sektor sosial ekonomi, yang menjadi inspirasi bagi kelahiran dan pertumbuhan sistem kapitalisme etnis Tionghoa. Adapun kriteria praktek kapitalisme etnis Tionghoa dapat dirumuskan :

1) Fanatisme kepercayaan terhadap takhayul dan magis disertai ketajaman intuisi memastikan untuk secara aksiomatik bahwa upayanya dapat meraih profit maksimal dari investasi yang dikeluarkan.
2) Pintu terbuka, normatif dengan bekerja saling percaya berlaku sesama etnis Tionghoa.
3) Materialisme dalam arti "Bussines is Bussines".
4) Organisasi kapital antara sesama etnis Tionghoa.
5) Sifat hemat dan perilaku membina kesederhanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pembinaan sesama etnis Tionghoa secara intensif terutama saling memberikan peluang dan saling memberikan keuntugan.[53]

C.3. Pola Perekonomian Imperialisme

Pola ini diterapkan sebagai upaya untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi oleh perusahaan besar/group milik orang Tionghoa. Cara kerja imperialisme Tionghoa dapat dicontohkan pada pendirian pabrik oleh perusahaan etnis Tionghoa-Pribumi, maka sangat kecil kemungkinannya untuk menyertakan perusahaan pribumi dalam rangka pembangunan pabrik tersebut.

Dalam perusahaan-perusahaan mereka, dari kepemilikan sampai pada pengelolaan semuanya diisi oleh orang-orang Tionghoa, sangat sedikit orang pribumi yang menempati posisi struktural dan kepemilikan. Alasannya, tidak lain adalah kemampuan usaha, kerja, berkreasi, tanggung jawab serta kemampuan memcahkan masalah orang-orang pribumi dianggapnya belum memenuhi syarat. Sesungguhnya ada kecenderungan bahwa mereka sebenarnya mengakui akan kemampuan orang pribumi dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan, akan tetapi tampaknya orang Tionghoa tidak mau memperkerjakan pribumi pada posisi tertentu dalam struktur organisasi perusahaannya karena kelak akan menjadi saingan berat.

B. Aspek Budaya

Pada aspek budaya etnis Tionghoa tidak bisa lepas dari kultur leluhurnya. Hal ini dapat kita lihat dari sikap penyesuaian yang bersifat tradisional terutama

[53] M.D. La Ode , ,,, hal 190-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digunakan oleh etnis Tionghoa dari generasi tua, yang tetap memegang teguh etika moral dalam kesatuan keluarga. Tujuan paraktis dari golongan tua ini adalah untuk mencari ketentraman dan kesejahteraan hidup keluarga. Oleh karena itu jalan yang ditempuh adalah tradisi berdagang, membuka industri dan profesi lain yang bisa menghasilkan keuntungan besar bagi keluarga.

Struktur keluarga yang bersifat extended family dari keturunan ayah, berfungsi dalam bidang sosio-psikologis, sosio-ekonomis, sosio-politis, dan sosio-budaya. Ikatan keluarga besar ini yang memegang monopoli dan peranan bagaimana seharusnya tiap-tiap anggota keluarga memperjuangkan pola hidupnya. Kerja sama dan pola hidup tunduk, taat dan patuh terhadap keluarga, serta sifat hemat dan rajin, merupakan modal keberhasilan dalam segala usahanya.

Sedangkan golongan generasi muda yang telah mendapat pendidikan Barat ikatan keluarganya cenderung kearah perubahan yang bersifat sikap hidup individualistis, walaupun dalam ikatan kerja sama tolong menolong dalam modal masih kuat. Walaupun demikian dalam kehidupan kepercayaan sehari-hari masih banyak unsur kepercayaan tradisi nenek moyangnya, terutama dalam penghormatan terhadap leluhurnya. Hal ini dianggap penting oleh mereka, sebagai alat media abstrak dalam hubungan dengan masyarakat Tionghoa yang masih tradisional, sehingga dengan demikian tetap terjalin ikatan dengan generasi tua walaupun berbeda agama yang dianutnya.

Disamping kedua golongan tersebut terdapat golongan lain yang sikap hidupnya lebih mengarah kepada cara hidup yang telah disesuaikan dengan tradisi daerah-daerah di Indonesia. Hal ini banyak terjadi pada para Tionghoa rantau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang datang ke Indonesia tanpa keluarga. Dalam perkembangannya banyak melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam. Golongan yang telah banyak berorientasi kepada suku-suku bangsa di Indonesia ini, dalam segi pola kehidupan ekonominya, tetap mengikuti golongan Tionghoa baik mereka yang berorientasi pada tradisi Barat.[54]

C. Aspek Sosial-Politik

Suatu pandangan yang bersifat makro, bahwa secara riil sejarah gerakan yang terjadi di Indonesia pada awal XX ternyata tidak hanya milik pribumi. Kenyataan sejarah menyatakan bahwa sejarah pergerakan nasional Indonesia ternyata juga dimiliki orang-orang Tionghoa di Indonesia. Pergerakan Tionghoa ini diprakarsai oleh kaum peranakan di Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki nasib serta mencapai perlakuan yang sama rata dari orang-orang Tionghoa baik totok maupun peranakan.

Nasionalisme Tionghoa Indonesia pertama kali menyatakan dirinya dalam bentuk perhimpunan Cina Raya (Pan Cina). Realisasi dari Pan Cina antara lain :

1. Pendirian sekolah Tiong Hoa Hwee Koa pada tahun 1901. Sekolah ini khusus untuk anak-anak Tionghoa terutama dari kalangan peranakan. Kurikulum disesuaikan dengan kurikulum di Tiongkok. Bahasa pengantar adalah bahasa Tionghoa, sedangkan sebagai pelajaran tambahan bahasa adalah bahasa Inggris. Tujuan sekolah THHK ini adalah mempromosikan kembali ajaran-ajaran konfusius dan kebudayaan Tionghoa.[55]

---

[54] Hidayat ZM, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1993), 117-120

[55] Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Gramedia, 1988), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diterbitkannya surat kabar Tionghoa yang dikelola oleh kaum peranakan Tionghoa dengan bahasa pengantar Melayu-Tionghoa. Surat kabar tersebut antara lain Li Po (1901) terbit di kota Sukabumi, Chabar Perniagaan (1903) di Batavia/Jakarta, Pewarta Soerabaia (1902) di Surabaya.
3. Didirikannya organisasi Shiang Hwee (kamar dagang) pada tahun 1907 dan 1908 dengan tujuan :
    a) Melindungi kepentingan dagang orang Tionghoa yang di diskrimnasikan orang Belanda dan terhadap perusahaan dagang orang pribumi.
    b) Menjadi penghubung antara orang Tionghoa perantauan dengan pemerintahan Tiongkok, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana bantuan materiil kepada negeri leluhurnya.[56]

Setelah Indonesia memproklamasikan Negara maka Indonesia mulai menentukan kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayah bekas jajahan Belanda. Dengan demikian pemerintah telah mengadakan kebijaksanaan membuka pintu bagi semua warga keturunan asing untuk menjadi warga Negara Indonesia dengan prosedur semudah mungkin. Langkah pertama kebijaksanaan pemerintah memberikan peluang bagi warga Negara asing untuk menjadi warga Negara Indonesia dengan lahirnya undang-undang kewarganegaraan No. 3/1967.

Kedudukan keturunan Tionghoa yang sulit memang tampak dalam dua sisi. Satu sisi dimata pribumi orang Tionghoa telah mempunyai konotasi negative,

---

[56] Hidayat ZM,,,, hal 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama tentang aspirasi politiknya yang condong pada pemerintahan yang berkuasa pada masa penjajahan. Sedangkan disisi lain bagi orang Tionghoa dengan memihak pada penguasa sangat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi mereka. Selain itu orientasi politik orang keturunan Tionghoa menunjukkan kecondongannya ke Tiongkok.

Untuk menangani masalah Tionghoa di Indonesia ini, maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut warga keturunan asing. Ternyata langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Orde Baru belum bisa mengena untuk menangani masalah Tionghoa ini dan orientasi mereka masih kuat ke tanah leluhurnya.

Suatu proses yang sangat panjang dan berbelit-belit bagi warga Negara keturunan Tionghoa untuk mengurus kewarganegaraan Indonesia ternyata menjadi problem yang cukup serius. Keadaan ini sangat mempengaruhi dinamika dan aspirasi mereka dalam politik. Peranan mereka hanya sebagai penonton dan perhatiannya tercurah pada usaha perdagangan. Sehingga mereka sering dinilai eksklusif. Dan dimata orang-orang Tionghoa pemerintah seakan-akan telah mewujudkan benteng diskriminasi politik terhadap orang-orang Tionghoa.

Namun di era reformasi ini masyarakat Tionghoa mendapat angin segar, mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan bahwasannya masyarakat Tionghoa mulai berani dan partisipasi pada kegiatan politik. Alasan mereka adalah dengan terlibat di politik mereka bisa memperjuangkan kembali hak-hak konstitusional yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direnggut oleh rezim sebelumnya. Disisi lain, keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik untuk membuktikan bahwa jiwa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap Indonesia juga dimiliki oleh orang Tionghoa (peranakan). Untuk menyalurkan aspirasi politiknya orang Tionghoa banyak yang terjun ke partai politik, tetapi disini mereka lebih memilih partai yang ber ideologi nasionalisme dari pada yang sektarian (partai berbasis agama). Alasannya adalah dengan partai nasionalisme, orang Tionghoa mampu menyentuh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Mereka enggan memilih partai sektarian karena takut dianggap memihak golongan atau kelompok , tentu saja ketakutan ini tidak terlepas dari perlakuan dikriminatif Tionghoa pada masa Soeharto.

Peristiwa tersebut pun juga dialami oleh masyarakat Tionghoa Surabaya, di Surabaya orang Tionghoa banyak yang lebih memilih partai yang tidak sektarian atau bisa dikatakan nasionalis. Buktinya keterwakilan masyarakat Tionghoa di Surabaya, dalam hal ini anggota DPRD Surabaya dihuni oleh empat anggota dewan berasal dari etnis Tionghoa. Diantara mereka cuma satu yang berbasis agama (Simon dari PDS), yang lainnya dari nasionalis (Baktiono dari PDIP, Agus dan Ernawati dari Demokrat). Disisi lain dengan adanya empat orang yang duduk di anggota DPRD, juga menunjukkan partisipasi politik orang Tionghoa mulai mengalami kemajuan.

D. Dinamika Politik di Surabaya

Dinamika politik ditandai pada era reformasi, dimana pasca rezim Soeharto tumbang keran demokrasi terbuka lebar bagi setiap golongan, komunitas, maupun etnis untuk menyalurkan ide atau gagasan politiknya. Bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kongkritnya dapat kita lihat dengan munculnya banyak partai pada pemilu 1999, hal ini juga terjadi di Surabaya. Partisipasi politik pasca era reformasi bisa dikatakan meningkat, penilaian tersebut dapat kita lihat pada pesta demokrasi yakni pemilu 1999. Pada pemilu tersebut kekuatan politik berubah, pada masa Soeharto partai Golkar mendominasi disetiap kalangan tetapi pada pemilu 1999 PDIP menjadi kekuatan absolut di Surabaya.

Pada periode awal pasca reformasi tahun 1999, anggota DPRD Surabaya didominasi oleh PDIP. Hal ini dapat kita lihat dari 21 anggota dewan yang berasal dari PDIP, pada saat itu ketua DPRD dijabat oleh Basuki dari PDIP. Ini menunjukkan bahwasannya pada masa peralihan ke reformasi, PDIP sukses melakukan pertarungan politik di Surabaya. Bisa dianggap pada periode itu adalah masa kejayaan PDIP di Surabaya. Bergeser pada periode selanjutnya yakni tahun 2004, kekuatan politik sulit ditebak. Tetapi PDIP yang pada periode sebelumnya mampu mendapat kursi mayoritas anggota dewan, kali ini juga masih tetap dengan perolehan kursi terbanyaknya yakni 13 kursi, dibuntuti kekuatan PKB dengan 11 kursi. Yang menjadi hal menarik adalah PDIP yang memperoleh banyak kursi tidak mampu menguasai jabatan penting yakni ketua DPRD. Pada pos ini PKB yang mendapat perolehan terbanyak kedua mampu menempatkan anggotanya yakni Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2004-2009. Ini menunjukkan bahwasannya PKB dengan posisi runner up nya mampu memainkan kontalasi politik di DPRD sehingga mampu menempatkan wakilnya menjadi ketua DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode selanjutnya tahun 2009 praktis kekuatan politik di Surabaya berubah drastis, Partai Demokrat sebagai partai baru mampu menjadi pemenang absolut pemilu tahun 2009. Di Surabaya partai Demokrat mampu menempatkan 16 kadernya yang duduk di anggota DPRD Surabaya. Jabatan pos penting juga berhasil diraihnya yakni dari Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 oleh Wisnu Wardhana, Ketua Banmus, Ketua Banggar, ketua BK, Ketua Komisi B, dan Ketua Komisi C. Pada periode sekarang, Demokrat menjadi kekuatan mayoritas bagi berlangsungnya segala pembuatan dan pengambilan keputusan-keputusan yang berlangsung di DPRD Surabaya.

Bagaimana keterwakilan etnis Tionghoa di anggota DPRD Surabaya? Dari data yang ditelusuri oleh peneliti dilapangan, partisipasi etnis Tionghoa pada periode sebelumnya yakni 1999 dan 2004 hampir tidak ada, praktis hanya menemukan satu anggota dewan dari PDIP yakni Baktiono yang berasal dari etnis Tionghoa. Eskalasi peningkatan parisipasi etnis Tionghoa terjadi pada periode 2009, dimana pada saat ini peneliti menemukan empat anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa. Yakni Baktiono dari PDIP yang menjabat tiga kali periode hingga sekarang, Agus dan Ernawati dari Partai Demokrat, dan Simon Lukatumpesy dari PDS. Hal ini menunjukkan bahwasannya periode sekarang partisipasi etnis Tionghoa meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti yang tercantum dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perolehan kursi anggota DPRD Surabaya
yang berasal dari Etnis Tionghoa pada pemilu 2004

Tabel 1

Periode	Partai Politik	Nama Anggota
2004-2009	PDI Perjuangan	Baktiono

Sumber : DPRD Surabaya

Perolehan kursi anggota DPRD Surabaya
yang berasal dari Etnis Tionghoa pada pemilu 2009

Tabel 2

Periode	Partai Politik	Nama Anggota
2009-2014	PDI Perjuangan	Baktiono
	Partai Damai Sejahtera	Simon Lekatumpessy
	Partai Demokrat	Agus Santoso
		Ernawati

Sumber DPRD Surabaya

E. Sebaran Etnis Tionghoa di Surabaya

Etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang menyebar di kota-kota besar Indonesia, salah satu kota besar tempat bermukim masyarakat Tionghoa adalah Surabaya. Di Surabaya, komunitas Tionghoa sudah menetap sejak zaman kolonial Belanda. Surabaya merupakan salah satu kota penting di Jawa dan salah satu kota tertua di Indonesia. Di masa kolonial, kota ini berkembang dan menjadi salah satu kota modern. Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang datang dan menetap di Surabaya, jumlah orang Tionghoa semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan kelompok imigran lain, Arab dan India, masyarakat Tionghoa menempati jumlah terbesar. Hal ini dapat dilihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data pada 1920, penduduk Tionghoa di Surabaya berjumlah 18.020 orang, Arab 2.539 orang, dan kelompok etnis Timur Asing lainnya 165 orang.[57] Dalam perkembangannya, etnis Tionghoa juga ikut andil pada perpolitikan tanah air, hanya saja keterlibatannya dalam politik tidak dimuat dan diekspos oleh media, ini terjadi karena rezim Soeharto yang mengekang segala aktivitas yang bernuansa Tionghoa.[58]

Kota-kota di Indonesia terutama Surabaya sejak dulu menjadi kota yang banyak disinggahi oleh orang asing, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, Arab, dan Tionghoa. Keberadaan mereka telah banyak mengubah perjalanan bangsa ini baik di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Peran negara yang sangat membantu perekonomian bangsa Indonesia kala itu salah satunya ialah masyarakat Tionghoa. Kedatangan mereka pada awalnya adalah untuk mengubah kehidupan mereka dari yang sebelumnya terpuruk dalam kemiskinan di negara asalnya dan berusaha mencari peruntungan di negara Indonesia.

Masyarakat Tionghoa ini banyak yang melakukan usaha perdagangan dan membuka toko-toko di kota besar seperti Batavia, Soerabaia, Semarang, dan lain-lain. Apa yang telah mereka lakukan sudah banyak mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Di Surabaya sendiri, keberadaan orang-orang Tionghoa ini sangatlah banyak sehingga muncullah pusat-pusat

---

[57] www.*Chinese Culture Zone.com,* 10 September 2012
[58] Maya (35), Aktivis 'Jejak Cina', Wawancara 7 September 2012, Jam 15.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkampungan Cina yang tersebar di Surabaya, seperti di daerah Kupang Dukuh, Kapasan dan Kembang Jepun.

Tahun 1951 jumlah penduduk Surabaya hanya sekitar 300 ribu jiwa saja. Padahal tahun 2010, penduduk Surabaya sudah berjumlah jutaan jiwa (sekitar dua juta jiwa). Yang menarik, daerah pecinan masih tetap tidak berubah dan masih favorit bagi etnis Tionghoa untuk tinggal dan berdagang. Ini terbukti dari banyaknya toko-toko dan perusahaan-perusahaan dagang baik besar maupun kecil di daerah pecinan yang pada umumnya milik etnis Tionghoa.

Di pecinan Surabaya, ada dua pasar utama, yaitu Pasar Pabean dan Pasar Kapasan. Pasar Kapasan, walaupun lebih kecil daripada Pabean, merupakan pusat perdagangan emas dan perhiasan di Jawa Timur. Sebaliknya, Pasar Pabean merupakan pasar yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Di dalam pasar ini terdapat banyak toko yang menjual barang pecah-belah, alat-alat rumah tangga, sembako, atau makanan-makanan Tionghoa seperti haisom atau teripang, jamur kering, ikan asin. Kembang Jepun sendiri adalah kawasan paling tua di Surabaya karena bersebelahan dengan sungai Kalimas dan Pelabuhan Tanjung Perak di utaranya. Bangunan di sekitar kawasan itu sangatlah kotor dan banyak yang tak terawat. Tapi di sinilah tepatnya sejarah Surabaya Tua (Old Surabaya) berawal serta kegiatan bisnis yang tidak pernah berhenti. Toko perlengkapan kantor, bank, toko tekstil, mesin diesel dan pakaian melengkapi pemandangan di kawasan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, untuk mengumpulkan orang Tionghoa mereka mempunyai wadah atau kelompok. Di Surabaya terdapat dua komunitas yang mengatasnamakan Tionghoa, yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Cabang Surabaya (INTI), yang terletak di jalan Karet Surabaya. Sedangkan yang kedua adalah Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS) yang terletak di Kembang Jepun Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA DATA

A. Liberalisasi Politik Etnis Tionghoa di Surabaya

Liberalisasi politik di Indonesia ditandai dengan proses transisi yakni peralihan kekuasaan dari rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto ke model demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru. Rezim terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Dalam penelitian ini konsep liberalisasi politik dikaji lebih dalam dengan nilai-nilai liberalisme, yakni :

A.1 Kebebasan

Jika kita amati etnis Tionghoa pernah mewarnai sejarah perpolitikan Indonesia, karena orang Tionghoa juga ada yang menjadi anggota BAPERKI, hanya saja dalam perkembangannya orang Tionghoa sengaja tidak ditampakkan oleh media ataupun masyarakat luas pada waktu itu. Yang menjadi titik peristiwa miris bagi orang Tionghoa adalah pada masa Soeharto menjabat sebagai presiden, wilayah diskriminatif oleh rezim Soeharto begitu kental bagi orang tionghoa. Penggunaan nama, budaya, bahasa mandarin, dan segala aktivitas yang ber bau Tionghoa dilarang oleh Soeharto. Maka dari itu, kebanyakan orang Tionghoa berkonsentrasi pada wilayah bisnis dan ekonomi saja, sebenarnya jika ditelaah lagi, banyak juga orang Tionghoa yang antusias dengan politik, hanya saja mereka takut oleh rezim soeharto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca reformasi bergulir, angin segar menaungi etnis Tionghoa. Keran demokrasi terbuka lebar bagi semuanya untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ranah publik. Kelompok, etnis, atau golongan yang dulunya dikekang oleh rezim Soeharto, saat ini bisa bebas melakukan segala aktivitas dan ide serta gagasan yang dibangun oleh tiap kelompok masing-masing. Peristiwa tersebut pun juga dimaknai positif oleh orang Tionghoa, mereka mulai berani tampil dan berperan aktif di ranah publik atau politik. Bagi Gus Dur, orang-orang Tionghoa sama dengan etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, yang sudah hidup lama dan menjadi bagian dari penduduk dan warga Negara Indonesia. Orang-orang dari kelompok keturunan Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia yang lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta mendapatkan perlakuan sama sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pembelaan Gus Dur pada kelompok keturunan Tionghoa, yang diwujudkannya melalui berbagai kebijakan (seperti PP. No. 6 Th 2000 dan pengumuman libur nasional Imlek).[59]

Sejak masa reformasi, terlebih lagi sejak era kepresidenan Gus Dur, keturunan Tionghoa mulai mendapatkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan keberagamaan mereka, menjaga dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya mereka, bahkan juga ikut ambil bagian dalam wilayah politik praktis Indonesia. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru dan sebelumnya, hanya orang keturunan Arab saja yang bisa duduk dalam kabinet. Pada wilayah politik praktis ini, kelompok keturunan Tionghoa ada yang bergabung untuk mendirikan partai

[59] Ibad MN, *Bapak Tionghoa Indonesia,* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik sendiri, dan sebagian besar tergabung dengan berbagai partai politik yang lain. Hal ini terlihat dari pernyataan sebagai berikut :

> *Peran Negara dan pemerintah terhadap etnis Tionghoa pasca reformasi sangat bagus, hal itu terlihat dengan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa, wilayah kebebasan untuk tampil di ranah publik maupun politik terbuka lebar bagi siapapun, orang-orang Tionghoa mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.*[60]

Dengan demikian, dari aspek politik, pemerintah Republik Indonesia terbukti tidak lagi memberlakukan tindakan diskriminatif terhadap salah satu kelompok atau etnis dalam warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, semangat pluralisme menjadi spirit bagi etnis Tionghoa. Dulu etnis Tionghoa "dianaktirikan" oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu merupakan apresiasi positif dan polos dari masyarakat Tionghoa terhadap kebijakan pemerintah yang telah memberikan persamaan hak dalam politik dan semua aspek kehidupan nasional bagi semua warga negaranya, tanpa kecuali terhadap etnis Tionghoa.

A.2. Demokrasi

Demokrasi memberikan kebebasan setiap warga Negara, baik secara individu, kelompok, maupun perhimpunan, untuk masuk dalam partai politik dengan berbekal keunggulannya masing-masing untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari konstituen. Dengan kata lain, memberikan respon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang diinginkan oleh masyarakat.

---

[60] Baktiono, anggota DPRD Surabaya, wawancara 18 Juli 2012, Jam 10.02 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu berarti bahwa kompetisi dimulai dengan format politik yang terkini, yaitu bahwa partai politik melalui kadernya tidak lagi terbelenggu oleh nomor urut para caleg sebagai akibat ditetapkannya sistem bebas atau sistem suara terbanyak sebagai penentuan pemenangan pemilu oleh Mahkamah konstitusi (MK) dengan cara merevisi pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemilu.[61] Jadi, dengan adanya peraturan baru ini, para kader partai politik berlomba-lomba untuk menarik dan mencari simpati dari konstituen agar mampu menjadi pemenang dalam pemilu.

Kader politisi masyarakat Tionghoa sadar dengan pola demokratisasi yang sedang berkembang di Indonesia dewasa ini, yaitu demokrasi liberal (liberal democracy). Demokrasi liberal dapat diibaratkan sebagai ruang persaingan semua politisi untuk mendapatkan kekuasaan dalam arti implementatif agar dapat memerankan peran Negara untuk memenuhi kepentingan diri, kelompok, bangsa, dan negaranya. Seperti yang diungkapkan berikut ini :

> *Ruang politik memang ruang persaingan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi semua itu kembali lagi kepada hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Bila kita flashback sejenak, politik Indonesia dahulu memang ada perbedaan antar sesama warga Negara untuk terlibat dalam politik, yaitu kelompok etnis Tionghoa dibatasi dalam politik, sedangkan warga Negara Indonesia lainnya (pribumi) bebas untuk terlibat dalam politik. Padahal sebenarnya undang-undang tidak membatasi kelompok etnis Tionghoa untuk terlibat dalam politik, tetapi karena kekuasaan Orde Baru saja yang membatasi kelompok etnis Tionghoa untuk terlibat dalam politik. Sebenarnya justru kalau kelompok Tionghoa tidak dibatasi untuk ikut dalam politik waktu pemerintahan Orde Baru, itu akan membuat Indonesia ini lebih indah dan lebih Indonesia seperti realitas ke-Bhinneka Tunggal ika-annya akan tampak secara nyata dari aspek politik.*[62]

---

[61] La Ode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), 285

[62] Agus Santoso, anggota DPRD Surabaya, wawancara 19 Juli 2012, Jam 11.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan menjadi suatu alat untuk menjalankan roda pemerintahan, hal ini dilakukan Soeharto pada eranya. Sayangnya kebijakan diskriminatif Soeharto terhadap etnis Tionghoa mengakibatkan terpasungnya hak-hak politik masyarakat Tionghoa. Hal ini terlihat jelas dengan dilarangnya berbagai aktivitas yang berbau Tionghoa. Padahal jika kita berpedoman pada undang-undang dan asas Negara republik Indonesia, semua warga Negara bebas melakukan aktivitas, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta mendapat perlakuan yang sama sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945.

A.3. Pluralisme

Dalam konsep pluralisme setiap individu mempunyai hak dan kepentingan terbuka, dimana setiap individu bebas berekspresi dan berkreasi terhadap apa yang dimilikinya. Dalam paham kemajukan, pluralisme menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan dengan demikian membentuk hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka; misalnya, mengenai kapan suatu kenaikan dalam jumlah atau efektivitas lingkup keterlibatan politik mengubah secara berarti tingkat pemusatan pengambilan keputusan, pertanggungan, dan aspek-aspek lain pembuatan kebijaksanaan pemerintah.[63]

Pluralisme memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan untuk memberikan ide dan gagasan bagi bangsa, hal ini dapat kita lihat dengan perwujudan kesamaan hak dan politik. Kesamaan hak dalam politik bagi tiap-tiap

[63] David Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Negara Indonesia menjadi salah satu penyebab keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam politik. Hal itu dikemukakan sebagai berikut :

> *Pergantian sistem dari Otoriter era Soeharto ke sistem demokrasi sekarang sangat menguntungkan bagi semua kalangan. Di era demokrasi saat ini masyarakat mempunyai hak yang sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Oleh sebab itu, saya menghimbau untuk warga Tionghoa secara luas agar terlibat atau terjun dalam dunia politik.*[64]

Era Orde Baru menjadi peristiwa kelam bagi semua kalangan untuk tampil di ranah publik, pergantian sistem dari otoriter ke sistem demokrasi menjadi angin segar bagi setiap kalangan untuk tampil diranah publik. Jadi, seperti yang dikemukakan oleh Ernawati, bahwasannya dengan pergantian sistem menjadi peluang bagi masyarakat Tionghoa agar ikut aktif didunia politik. Pemerintah tidak akan membedakan terhadap semua etnis apa pun untuk bergerak di bidang apa pun yang ada di Negara Indonesia, tak terkecuali di bidang politik. Kesamaan hak dan kewajiban harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tionghoa dengan sebaik-baiknya, trauma atau ketakutan politik pada masa Orde Baru tidak harus diingat-ingat agar mampu mewujudkan masa depan politik yang lebih baik bagi masyarakat Tionghoa.

A.4. Identitas Tionghoa

Pada masa Orde Baru kegiatan politik etnis Tionghoa tidak nampak, identitas Tionghoa pun sengaja disembunyikan. Pada era reformasi identitas etnis dalam politik mulai berani dimunculkan, ini terjadi karena pergantian rezim baru dan juga semangat politik etnis Tionghoa untuk tampil diranah publik. Di Surabaya sendiri identitas Tionghoa tidak menjadi masalah bagi masyarakat

---

[64] Ernawati, anggota DPRD Surabaya, wawancara 3 Juli 2012, 11.35 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya untuk aktivitas di ranah publik, hanya saja dalam kegiatan politiknya orang-orang Tionghoa masih enggan untuk menampakkan identitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber berikut ini :

> *Masyarakat Tionghoa masih banyak yang enggan menunjukkan jati dirinya ketika terjun kedunia politik, hal ini terjadi disebabkan oleh trauma politik pada Orde Baru.*[65]

Apa yang diungkapkan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak juga masyarakat Tionghoa yang mengalami trauma politik pada masa Orde Baru. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk terjun atau terlibat dalam kegiatan politik. Trauma politik pada masa Orde Baru menjadi alasan tersendiri bagi kaum tua Tionghoa, sedangkan kaum muda lebih di arahkan kepada wilayah bisnis dan perdagangan.

Kemunculan Identitas Tionghoa dalam politik bisa menjadi sebuah kelemahan dan kelebihan dalam proses politik etnis Tionghoa. Disebut menjadi kelemahan, apabila mind set masyarakat etnis Tionghoa masih berkutat pada peristiwa dikriminatif sebelum-sebelumnya. Sedangkan bisa menjadi kelebihan atau kekuatan positif, apabila semangat perubahan dan nasionalisme tertanam pada jiwa etnis Tionghoa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yakni dengan jalur politik. Kedua hal iniliah yang seharusnya mampu ditelaah lagi dampak positif atau negatifnya ketika etnis Tionghoa terjun ke dunia politik.

B. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Surabaya

Partisipasi politik merupakan aspek terpenting dalam demokrasi. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan

---

[65] Baktiono, Anggota DPRD, Wawancara 3 Agustus 2012, Jam 10.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik menunjukkan bahwa partisipasi politik bebas dimiliki oleh semua kalangan, baik etnis maupun golongan. Kemajuan partisipasi politik Tionghoa ditandai dengan pergantian rezim dari Orde Baru ke era reformasi. Bentuk perubahan politik kelompok Tionghoa adalah dari tidak boleh berpolitik pada era Orde baru menjadi boleh berpolitik pada era reformasi dengan ruang politik yang sangat besar.

Menurut Paige, membedakan partisipasi menjadi empat tipe. Pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah maka disebut militan radikal. Keempat, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).[66]

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Yang termasuk partisipasi aktif (kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik) adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Yang termasuk partisipasi pasif ialah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja

[66] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap keputusan pemerintah, seperti pada pemilihan umum. Bentuk-bentuk dari partisipasi politik antara warga negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Tinggi rendahnya partisipasi tersebut karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah. Selain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Fungsi partisipasi politik yaitu menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan, mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan, mengawasi proses politik, serta partisipasi politik dimanfaatkan sebagai mekanisme beroperasinya nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara.

Mengacu pendapat Paige, pada penelitian ini difokuskan pada dua bentuk model partisipasi politik, yakni aktif dan pasif.

B.1. Partisipasi Politik Aktif

Pasca reformasi bergulir tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa mulai mengalami kemajuan, hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya masyarakat Tionghoa yang ikut terlibat di partai politik dan munculnya beberapa organisasi yang bernuansa Tionghoa. Hal ini dikemukakan oleh Simon Lekatumpessy:

> *Bentuk partisipasi politik Tionghoa saat ini dapat kita lihat dengan banyaknya organisasi yang ber label Tionghoa, dan juga orang Tionghoa sekarang mulai sadar politik dengan terjun di partai politik. Di DPRD Surabaya sendiri ada tiga partai politik yang didalamnya terdapat etnis Tionghoa, yakni Demokrat, PDIP, dan PDS. Keterwakilan etnis Tionghoa di DPRD Surabaya menunjukkan bahwasannya etnis Tionghoa juga mampu dalam bersaing untuk melakukan aktivitas politik.*[67]

[67] Simon Lekatumpessy, anggota DPRD Surabaya, wawancara 5 Juni 2012, Jam 12.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menanggapi pernyataan Simon, maka partisipasi politik (aktif) etnis Tionghoa dapat dikategorikan dalam dua bentuk :

1) Politik praktis

Keterlibatan etnis Tionghoa tersebar di tiga partai yang ada di DPRD Surabaya, ketiga partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Damai Sejahtera. Hal ini dapat kita lihat di komposisi anggota DPRD Surabaya. Di DPRD Surabaya periode 2009-2014 terdapat empat anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa, mereka tersebar di beberapa partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Baktiono, menjabat sebagai Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan), Partai Demokrat (Agus santoso, menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan, dan Ernawati, menjabat sebagai anggota Komisi C bidang Pembangunan), dan Partai Damai Sejahtera (Simon Lekatumpessy, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C bidang Pembangunan).

Partisipasi politik etnis Tionghoa Surabaya pada periode 2009-2014 yang duduk di anggota dewan mengalami kemajuan karena pada periode sebelumnya (2004-2009) praktis hanya Baktiono dari PDIP yang berasal dari etnis Tionghoa. Hal ini bisa dikatakan bahwasannya tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, dan juga dapat dilihat bahwa ketika etnis atau golongan bila diberi kebebasan dan kesempatan yang sama di ranah publik ternyata mereka juga bisa membuktikannya.

2) Organisasi Sosial Tionghoa

Pada era Orde Baru seluruh aktivitas maupun organisasi yang ada kaitannya dengan etnis Tionghoa dilarang keras oleh Soeharto. Dampaknya segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan yang ber bau Tionghoa tidak bisa tampil diranah publik. Pasca reformasi bergulir keran demokrasi terbuka selebar-lebarnya bagi setiap etnis, suku, golongan, maupun kelompok untuk terjun atau aktif diranah publik, begitupun juga dengan etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa yang dipandang sebelah mata serta diperlakukan diskriminatif pada rezim Soeharo mulai berani dan tampil di ranah publik. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya beberapa organisasi Tionghoa yang berdiri, salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS). Lahirnya organisasi-organisasi Tionghoa tersebut menunjukkan bahwa mereka mulai berpartisipasi terhadap kegiatan di ranah publik. Lalu bagaimana kegiatan politik kedua organisasi tersebut? Perhimpunan INTI tidak mencantolkan diri kepada kekuatan politik apapun dan berusaha selalu independen. Dalam menghadapi pemilu, perhimpunan INTI menganjurkan para anggota dan simpatisannya untuk menggunakan hati nurani dan pengetahuan politiknya untuk menentukan pilihannya.[68]

Berbeda lagi dengan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS), organisasi ini lebih aktif pada kegiatan sosial kesehatan, seperti bakti sosial dan pengobatan.[69] Mereka lebih antusias pada wilayah sosial kesehatan dari pada kegiatan politik. Hal yang unik dari organisasi ini adalah, apabila anggotanya terlibat pada partai politik atau politik praktis cepat atau lambat anggota tersebut harus keluar dari organisasi PMTS, ini terjadi karena organisasi ini murni bergerak pada wilayah sosial dan kesehatan saja. Apabila aroma politik masuk di

---

[68] William, Wakil Ketua INTI Jawa Timur, Wawancara 27 April 2012, Jam 10.30 WIB
[69] Djono Antowijono, Ketua PMTS Surabaya, Wawancara 27 April 2012, Jam 10.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi ini, dikhawatirkan akan merusak eksistensi organisasi PMTS di bidang sosial kesehatan.

B.2. Partisipasi Politik Pasif

Di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyalurkan ide maupun gagasannya dalam berpolitik. Momentum kebebasan seperti ini harusnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh semua kalangan, begitu juga dengan peran etnis Tionghoa dalam politik. Namun dengan seiring berjalannya waktu aktivitas Tionghoa dalam politik belum bisa dikatakan maksimal. Banyak faktor penghalang untuk masyarakat Tionghoa ketika aktif didunia politik. Disamping trauma politik pada Orde Baru, pola berpikir serta mind set masyarakat Tionghoa yang lebih mengutamakan ranah bisnis dan perdagangan sebagai aktifitas utamanya. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber berikut ini :

> *Bagi saya politik itu hal yang sangat kotor karena untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya menghalalkan segala cara, bisa dengan cara penipuan atau bahkan pembunuhan.*[70]

Apa yang diungkapkan narasumber diatas tentunya mengacu pada peristiwa kelam yang dialami oleh etnis Tionghoa pada masa Soeharto dulu. Trauma politik menjadi salah satu faktor utama bagi masyarakat Tionghoa tatkala mereka enggan dikaitkan dengan persoalan politik.

Di sisi lain, apabila ada pemilihan umum, baik pilpres, pileg, atau pilkada. Masyarakat Tionghoa enggan untuk menyalurkan hak politiknya, malah mereka banyak yang melakukan liburan bersama keluarganya. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini:

---

[70] Anton (45), wawancara 6 September 2012, Jam 19.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Masyarakat Tionghoa banyak yang masih enggan untuk terjun ke dunia politik. Mereka masih kurang dalam berpartisipasi politik, ini terlihat pada saat pemilu masyarakat Tionghoa lebih memilih holiday/liburan dengan keluarga ketimbang melakukan pencoblosan di TPS. Yang menjadi pekerjaan penting bagi etnis Tionghoa yang ada di DPRD sekarang adalah menghimbau dan menyadarkan masyarakat Tionghoa agar berpartisipasi dalam politik dan mengubah mind set bahwasannya politik itu tidak kotor, yang menjadikan Kotor adalah orang yang melakukan aktivitas politiknya atau aktor politiknya.*[71]

Dari pernyataan diatas menunjukkan, apabila dilihat secara global keterlibatan etnis Tionghoa masih minim. Anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa diharapkan mampu memberikan pendidikan politik serta penyadaran untuk terlibat terhadap kegiatan politik. Bentuk penyadaran dan pendidikan politik dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di komunitas-komunitas Tionghoa atau rumah ibadah (gereja, klenteng). Upaya ini bisa dianggap efektif apabila seluruh stakeholder Tionghoa mampu bekerja sama dengan baik.

C. Latar Belakang Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

Keterlibatan etnis Tionghoa di politik sering kali dipandang sebelah mata oleh semua kalangan masyarakat. Hal itu terjadi bukan karena sebab, pengalamannya di politik belum teruji betul dan juga kemampuan secara skill masih diragukan oleh semua kalangan. Jika diamati, etnis Tionghoa pada masa Orde Baru bisa dikatakan mengalami dilema politis, maksudnya adalah jika ia terlibat di ranah politik mereka tidak bisa karena sebuah peraturan, namun jika hanya diam bisa dikatakan menerima ketertindasan. Ada juga etnis Tionghoa yang

---

[71] Simon Lekatumpessy, anggota DPRD Surabaya, wawancara 5 Juni 2012, Jam 12.32 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aktivitas politik secara sembunyi-sembunyi, itu pun mungkin cuma satu-dua orang saja.

Pada era reformasi saat ini, semua etnis, suku, golongan bebas melakukan aktivitas di ranah publik. Etnis Tionghoa pun mengambil bagian di ranah politik, keterlibatan mereka mampu mengangkat nama Tionghoa di ranah politik. Tetapi keterlibatannya dipandang remeh oleh semua kalangan, etnis Tionghoa yang mayoritas memilih jalur bisnis dan perdagangan sangat diragukan ketika tampil diranah politik. Keraguan masyarakat terhadap etnis Tionghoa mampu dijawab dengan duduknya empat anggota dewan di Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa.

Keterlibatan etnis Tionghoa di politik mempunyai latar belakang yang sangat beragam. Terdapat tiga latar belakang yang menjadi faktor utama ketika etnis Terjun ke politik. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

C.1. Motif Etnis Tionghoa di Dunia Politik Praktis

Masyarakat Tionghoa di Surabaya sesungguhnya sangat merasakan betapa rendahnya harkat dan martabat kelompoknya ketika ada pembatasan keterlibatan etnis Tionghoa di dalam politik yang dilakukan oleh rezim Soeharto selama 32 tahun. Akibat pemberlakuan diskriminasi politik, urusan surat menyurat atau administratif kependudukan menjadi terhambat. Generasi muda Tionghoa tidak dapat mengenyam pendidikan di universitas negeri di seluruh Indonesia. Selain itu, juga tidak dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, maupun Polisi, kecuali sangat sedikit (satu atau dua orang saja). Hal ini juga dialami oleh Agus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso pada tahun 90 an, saat itu beliau ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk di daerah sekitar. Berikut hasil wawancaranya :

> *Pada tahun 90 an, saya waktu itu mengurus KTP di tempat tinggal saya, tetapi pada saat itu KTP tidak bisa diurus. Hal ini memperlihatkan adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada saat itu.*[72]

Pernyataan diatas menunjukkan, apa yang terjadi pada Agus pada tahun 90 an terlihat betul wilayah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Namun, setelah era reformasi mulai berlaku pada tahun 1998, masyarakat Tionghoa langsung memanfaatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia untuk turut terlibat dalam politik sebagaimana warga Negara lainnya.

Alasan terjun ke politik

Keterlibatan anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa dalam politik mempunyai alasan berbeda-beda, Berikut ini pernyataan yang dikemukakan oleh anggota dewan:

> *Alasan terjun ke politik, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air/nasionalisme bisa dengan terjun ke politik. Dan juga karena semua warga masyarakat dengan sistem demokrasi ini berhak memilih dan dipilih.*[73]
> *Saya terjun ke politik karena ingin tahu bagaimana rasanya menjadi anggota dewan dan saya bisa membuktikan nasionalisme etnis Tionghoa terhadap bangsa.*[74]

Konstitusi Indonesia sebenarnya tidak melarang sesuatu golongan atau kelompok etnis apapun untuk tidak terlibat dalam politik. Bahkan, sebaliknya, Negara memberikan jaminan bahwa semua warga Negara Indonesia memiliki kesamaan hak untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat atau berpolitik. Serta

---

[72] Agus Santoso, anggota DPRD Surabaya, wawancara 3 Agustus 2012, Jam 11.00 WIB
[73] Agus Santoso, anggota DPRD Surabaya, wawancara 28 Mei 2012, Jam 11.00 WIB
[74] Ernawati, anggota DPRD Surabaya, wawancara 18 Juli 2012, Jam 11.35 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sistem demokrasi saat ini, warga Negara berhak untuk memilih atau dipilih dalam ranah politik.

Dengan alasan diatas, perilaku politik Agus dan Ernawati dapat dianalisis dengan pendekatan psikologis, yang artinya sikap pilihan politik mereka didasarkan pada penilaian terhadap suatu sistem, yaitu sistem demokrasi yang terbuka bagi semua kalangan untuk bebas menentukan pilihan politiknya. Jadi, pendekatan psikologis menekankan pada kemampuan sosialisasi seseorang yang nantinya berimbas kepada pilihan rasional politiknya.

Faktor lain yang menjadi alasan etnis Tionghoa terjun di dunia politik adalah faktor sosiologis yakni lingkungan sekitar, banyak masyarakat Tionghoa ketika dalam kehidupan sehari-harinya berdekatan dengan politik, birokrasi, maupun hukum. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber Simon berikut ini :

> *Alasan terjun ke politik karena faktor lingkungan dan rasa ingin tahu bagaimana menjadi anggota dewan dan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Lingkungan saya kebanyakan orang yang terjun di birokrat dan politisi sehingga membawa juga ingin terjun ke politik prakti, salah satu teman saya yang terjun ke politik sekarang adalah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah .*[75]

Dalam kegiatan politik, lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung untuk keterlibatan seseorang dalam menjatuhkan pilihannya untuk terjun ke politik praktis. Keterlibatan Simon dalam politik, didasarkan pada pendekatan sosiologis yakni faktor lingkungan, karena dulunya beliau berkumpul dengan orang-orang yang terjun ke politik praktis, salah satunya adalah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti

[75] Simon , anggota DPRD Surabaya, wawancara 5 Juni 2012, Jam 12.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan berbangsa bernegara, dan pengalaman hidup pada umumnya. Jadi, faktor lingkungan membentuk kepribadian seorang Simon untuk mempunyai keinginan agar bisa terjun di politik. Hal itu pun bisa diwujudkannya dengan menjadi anggota dewan di Surabaya.

Faktor lingkungan keluarga juga menjadi alasan yang dikemukakan oleh Baktiono. Keterlibatan Baktiono di politik secara langsung dipengaruhi oleh keluarganya, berikut ini hasil wawancaranya :

> *Saya terjun politik karena dulunya orang tua sebagai anggota dewan juga, sehingga sejak kecil secara tidak langsung diajarkan tentang politik..*[76]

Keterlibatan politik etnis Tionghoa tidak terlepas dari faktor lingkungan sosial politik secara langsung yakni keluarga. Lingkungan keluarga secara tidak langsung membentuk kepribadian seseorang untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi faktor utama Baktiono masuk ke dunia politik, apalagi dengan posisi orang tuanya yang juga terjun ke politik praktis. Hal lain yang perlu diapresiasi dari etnis Tionghoa adalah semangat untuk mau terjun ke dunia politik, karena tidak semua orang mempunyai spirit kemauan tersebut. Meskipun mereka etnis Tionghoa yang dulunya diberlakukan secara diskriminatif, tapi untuk saat ini semangat positifnya perlu ditiru dan dicontoh bagi semua kalangan masyarakat secara luas.

---

[76] Baktiono, anggota DPRD Surabaya, wawancara 28 Mei 2012, Jam 11.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C.2 Modal Sosial Politik Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

Untuk mewujudkan politik yang bersih dan baik, keterlibatan seseorang dalam politik harus mempunyai modal politik yang kuat. Latar belakang serta track record aktifitas politik sebelum menjadi anggota dewan, baik di organisasi masyarakat/organisasi politik, atau LSM, mampu menjadi bekal tatkala seorang politisi akan maju mencalonkan diri pada pemilihan umum. Namun tidak semua demikian, ada juga seseorang yang maju mencalonkan diri pada pemilihan umum yang sebelumnya tidak pernah aktif di kegiatan politik. Seperti yang diungkapkan narasumber Agus Santoso dan Ernawati berikut ini :

> *Sebelum menjadi anggota dewan saya tidak pernah ikut dalam organisasi atau partai politik, karena latar belakang saya adalah orang hukum.*[77]
> *Saya tidak pernah ikut dalam organisasi atau partai politik sebelum menjadi anggota dewan, karena di era demokrasi saat ini bebas menentukan pilihannya. Maka dari itu pada tahun 2007 saya bergabung ke partai Demokrat.*[78]

Hal menarik diungkapkan oleh kedua narasumber diatas. Keterlibatan mereka di politik praktis tidak diimbangi dengan modal politik yang kuat dan memadai dengan tidak adanya bekal pengalaman organisiasi ataupun pengalaman politik sebelumnya. Padahal ketika seorang menjadi anggota dewan, banyak masalah dan problem rakyat yang harus diselesaikan dengan cepat dan bagus. Apabila seorang anggota dewan mempunyai bekal pengalaman politik atau organisasi sebelumnya, maka secara tidak langsung pengalaman tersebut membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di konstituennya, serta mampu menunjang skill terhadap perilaku politik anggota tersebut.

---

[77] Agus Santoso, Wawancara 26 Juli 2012, Jam 11.55 WIB
[78] Ernawati, Wawancara 26 Juli, Jam 14.35 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajang menjadi wakil rakyat sejatinya mampu mengemban aspirasi rakyatnya, skill yang mumpuni dapat menunjang perilaku politik, jangan sampai ada asumsi dasar bahwasannya menjadi wakil rakyat sebagai ajang coba-coba. Mengacu pada fungsi Legislatif yakni menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang, serta fungsi kontrol terhadap segala kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Anggota dewan diharapkan mampu membuat segala kebijakan yang berpihak pada rakyat. Untuk menjalankan semua fungsi legislatif tersebut, anggota dewan harus mempunyai modal politik yang bagus untuk mencerna segala kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Apabila seorang anggota dewan tidak mempunyai modal politik yang kuat, maka menjadi sebuah keraguan kepada anggota dewan untuk mampu menjalankan dengan baik fungsi dari legislatif.

Modal politik harus dipersiapkan betul jauh-jauh hari menjelang pemilu, apabila seseorang terjun ke politik praktis tidak mempunyai bekal politik yang memadai, jangan salahkan masyarakat jika meragukan kinerjanya. Karena selama ini banyak juga anggota dewan yang tidak mengerti sama sekali tentang politik, kemudian mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Kelemahan dalam berpolitik tatkala seseorang menjadi anggota dewan dan tidak mempunyai pengalaman politik atau organisasi sebelumnya diungkapkan oleh Agus Santoso, beliau berpendapat sebagai berikut ini :

> *Ketika seorang terjun ke politik praktis alangkah baiknya jika mempunyai pengalaman politik/organisasi sebelumnya, karena dengan itu kita mampu memobilisasi masa, mengatur konstituen, dan mempunyai sepak terjang yang luas dalam politik. Tetapi itu semua tergantung pada individu masing-masing, buktinya saya juga mampu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasi itu semua, meskipun saya tidak pernah ikut organisasi sebelumnya.[79]

Pengalaman politik atau kegiatan sosial di organisasi mampu menjadi modal untuk seseorang terjun ke dunia politik. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber diatas, pengalaman politik atau organisasi dapat menjadi faktor penunjang dalam kegiatan politik tatkala seorang menjadi anggota dewan. Jadi, alangkah baiknya jika seseorang ingin maju menjadi anggota dewan, mereka harus mempunyai track record yang jelas sehingga nantinya dapat benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal yang berbeda dialami oleh Simon Lekatumpessy, sebelum menjadi anggota dewan, beliau pernah juga terlibat di sebuah partai. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini :

Sebelum menjadi anggota dewan saya pernah ikut partai pada era pasca reformasi yakni Partai Bhineka, pasca bubarnya partai Bhineka saya lebih aktif di kegiatan Gereja dan pada tahun 2002 saya ikut PDS.[80]

Keterlibatan Simon dalam partai pasca reformasi menunjukkan bahwasannya beliau mempunyai modal politik untuk menjadi anggota dewan. Pengalaman sebelumnya yang pernah ikut partai politik kemudian mengalami kegagalan, mampu dijadikan sebuah pembelajaran. Setelah partai awalnya bubar, beliau aktif lagi ke politik dengan masuk ke Partai Damai Sejahtera. Masuknya Simon ke PDS juga tidak lepas dengan aktifnya beliau di Gereja, kita tahu bahwasannya PDS adalah partai berbasis agama. Jadi, dalam perjalanan politiknya

[79] Agus Santoso, Wawancara 31 Juli, Jam 19.30 WIB
[80] Simon L, Wawancara 26 Juli, Jam 12.50 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simon mampu bangkit kembali untuk melakukan aktivitas politiknya dengan bendera yang berbeda.

Apa yang telah dialami Simon, berbeda dengan yang dialami oleh Baktiono. Keterlibatan Baktiono dalam politik mempunyai modal politik yang dibangun dari awal, artinya ketrlibatannya dalam politik memiliki pengalaman dan persiapan yang matang untuk menjadi anggota dewan. Berikut hasil wawancaranya:

> *Saya aktif di politik sejak tahun 1996 yakni menjadi kader di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),karir saya di partai dari pengurus Kecamatan dan sekarang menjadi Bendahara DPC PDIP Surabaya, jadi politik bagi saya sudah menjadi bagian dari kehidupan.* [81]

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa, Baktiono mempunyai pengalaman politik yang panjang. Baktiono yang dibesarkan dalam suasana politis, karena orang tuanya dulu juga menjadi anggota dewan dan aktif di PDI. Sehingga secara tidak langsung Baktiono sedikit banyak tahu tentang politik. Sosok Baktiono dikenal sebagai kader PDIP yang sangat militan, kiprah politiknya di partai diawali di tingkat Kecamatan hingga saat ini menjadi Bendahara DPC PDIP Surabaya. Pengalaman politik tersebutlah yang menghantarkan Baktiono menjabat sebagai anggota dewan selama tiga kali periode berturut-turut. .

C.3. Modal Ekonomi Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

Dalam sistem demokrasi yang terjadi saat ini, biaya untuk terjun atau aktivitas di politik sangatlah mahal. Modal ekonomi menjadi salah satu faktor

[81] Baktiono, Wawancara 26 Juli, Jam 11.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama tatkala seseorang terjun ke politik, apabila mempunyai modal ekonomi yang besar maka peluang menjadi pemenang sangatlah besar. Hal ini dimanfaatkan betul oleh etnis Tionghoa ketika terjun ke politik, latar belakang masyarakat Tionghoa yang mempunyai modal banyak menjadi penopang ketika terjun ke politik.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik tidak lepas dari modal ekonominya yang sangat kuat. Mayoritas latar belakang orang Tionghoa adalah mempunyai usaha bisnis dan perdagangan. Oleh sebab itu ketika masyarakat Tionghoa terjun ke politik mereka mempunyai peluang yang besar. Apalagi dengan sistem demokrasi saat ini bukan menjadi rahasia lagi bahwa siapa yang punya modal besar maka peluang untuk menjadi pemenang sangat besar juga. Dengan modal finansial yang memadai para etnis Tionghoa terjun ke politik praktis.

Modal ekonomi sangat menunjang pada saat kampanye berlangsung, jikalau modal ekonomi kuat, maka peluang menjadi pemenang sangat besar. Lalu bagaimana model kampanye para anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa dan kira-kira menghabiskan uang berapa ketika kampanye berlangsung, berikut hasil wawancaranya:

> *Pada saat kampanye saya turun ke jalan menemui masyrakat lapisan bawah, waktu kampanye mungkin saya yang paling kecil merogoh kocek untuk biaya kampanye yakni hanya Rp 75 juta.*[82]

Dari pernyataan diatas menunjukkan, bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan Baktiono dan menelan biaya tidak begitu banyak merupakan hal yang

[82] Baktiono, Wawancara 26 Juli, Jam 11.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lumrah dan wajar, hal itu terjadi karena Baktiono sudah dikenal dan mempunyai popularitas dikalangan masyarakat dengan pengalamannya menjabat sebagai anggota dewan dua periode sebelumnya. Jadi, pengalaman politik dan popularitas menjadi hal yang penting ketika seorang akan maju mencalonkan diri sebagai anggota dewan.

Hal berbeda dialami oleh anggota dewan yang lainnya yakni Agus Santoso, karena beliau baru terjung ke politik praktis maka harus membangun komunikasi politik dan model kampanye yang bagus agar menang dalam pemilu. Berikut ini model kampanye Agus Santoso :

> *Pada waktu kampanye saya melakukan kegiatan di bidang kesehatan yakni dengan mengajak masyarakat lapisan bawah yang sakit untuk berobat gratis ke Rumah Sakit tertentu. Serta menyebar sticker/logo ke tukang becak. Biaya yang saya keluarkan saat kampanye kurang lebih Rp 300 juta.*[83]

Dari pernyataan diatas menunjukkan, bahwa model kampanye yang dilakukan oleh Agus yakni dengan membidik kalangan bawah mampu menguntungkannya. Apalagi dengan model pengobatan gratis, kita tahu masyarakat bawah banyak yang sakit dan tidak mampu berobat. Hal inilah yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Agus dalam kampanyenya. Tidak heran bila biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 300 juta, belum lagi biaya tersebut juga untuk penyebaran stiker/logo kepada tukang becak.

Model yang hampir sama juga dilakukan oleh Ernawati, dalam kampanyenya beliau juga turun ke masyarakat lapisan bawah. Seperti yang diungkapkannya berikut ini:

---

[83] Agus Santoso, Wawancara 26 Juli 2012, Jam 11.55 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kampanye saya waktu itu turun ke masyarakat lapisan bawah serta menyebar atribut kaos dan stiker kepada semua warga.*[84]

Model kampanye yang dilakukan Ernawati hampir sama dengan Agus, sasaran kampanyenya adalah masyarakat lapisan bawah dan menyebar atribut kaos serta stiker. Apabila kita tarik pada konsep pilihan rasional, masyarakat sebagai pemilih lebih banyak menggunakan tindakan Afektif, artinya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang tanpa kesadaran penuh dan sebagai reaksi spontan terhadap suatu peristiwa. Jadi, kebanyakan masyarakat ketika memilih para calon wakil rakyat seringkali tidak menggunakan pertimbangan akal sebagai bentuk saluran politiknya.

Sedangkan bagi Simon, kampanye ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah dengan sasaran kendaraan angkutan umum, kemudian terhadap gereja-gereja yang ada di Surabaya. Berikut ini hasil wawancaranya:

> *Pada saat kampanye saya menyebar kaos, stiker, menggelar pesta rakyat (music dangdut), dan menempelkan logo di bagian belakang angkutan umum. Serta melakukan sosialisasi ke gereja-gereja. Saya menghabiskan dana sekitar Rp 300 juta.*[85]

Dari pemaparan diatas, masyarakat bawah tetap menjadi sasaran proses kampanye. Hal yang membedakan dari ketiga calon lainnya adalah kegiatan sosialisasi Simon dilakukan ke gereja-gereja. Partai Damai Sejahtera yang basis masanya banyak umat kristiani menjadi sasaran dan target utama bagi Simon untuk melakukan kampanye politiknya.

---

[84] Ernawati, Wawancara 26 Juli, Jam 14.35 WIB
[85] Simon L, Wawancara 26 Juli, Jam 12.50 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa komentar di atas menunjukkan bahwasannya kekuatan finansial menjadi suatu alat yang paling ampuh untuk memenangkan pesta demokrasi. Dari keempat anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa, kebanyakan dari mereka mempunyai usaha bisnis yang menjanjikan sehingga mampu memenuhi biaya politik yang sangat mahal tersebut, diantaranya: Baktiono (Pengusaha Krupuk), Simon Lekatumpessy (Pengusaha Reklame), Agus Santoso (Pengusaha Batu Bara). Dengan memanfaatkan modal ekonomi yang memadai mereka mampu melenggang untuk menjadi pemenang pada pemilu pada tahun 2009. Biaya politik yang sangat mahal praktis hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kalangan atas dan menjadi masalah atau hambatan bagi kaum menengah ke bawah untuk terjun ke politik praktis.

Dari konteks penggunaan modal etnis Tionghoa masuk dalam politik, segi ekonomi menjadi faktor utama dibandingkan dengan segi politik. Modal ekonomi menjadi kekuatan utama kemenangan seseorang untuk maju pada proses pemilihan umum. Ini salah satu akibat dari sistem pemilihan langsung dengan model proporsional terbuka, artinya suara terbanyaklah yang menjadi pemenang, tidak berpatokan pada nomor urut lagi. Kelemahan dari sistem ini adalah memungkinkan para kader-kader yang berkualitas di partai kalah bersaing dengan kader yang mempunyai banyak uang dan dengan jalur instan. Lebih parah lagi, sistim proporsional terbuka sangat rentan dengan korupsi dan *money politics*. Penyebabnya, sistem proporsional terbuka menghalalkan segala cara untuk mendanai keperluan sebagai caleg, seperti sosialisasi, kampanye, manuver-manuver politik dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan model seperti ini masyarakat Tionghoa ketika terjun ke politik merasa diuntungkan, karena mereka mempunyai modal yang sangat besar dan mendapat peluang besar pula untuk menjadi pemenang. Serta, sistem ini memungkinkan para kader-kader yang berkualitas di partai kalah bersaing dengan kader yang mempunyai banyak uang.

D. Performance Anggota Dewan Dari Etnis Tionghoa di DPRD Surabaya

a. Respon Simon Lekatumpessy Terhadap Kebijakan Pajak Reklame

Ketika seseorang menjadi anggota dewan sejatinya harus mampu mengemban aspirasi rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di Surabaya ada beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, salah satunya adalah kenaikan pajak reklame hingga 38 % yang dikeluarkan Pemerintah kota Surabaya pada tahun 2010. Pada kasus ini terjadi tarik ulur kepentingan antara Pemkot Surabaya selaku pembuat kebijakan dengan DPRD Surabaya sebagai perwakilan rakyat. Kasus ini menyita banyak perhatian publik di Surabaya, khususnya sektor pengusaha reklame. Pengusaha reklame merasa keberatan jika pajak reklame dinaikkan. Kasus ini pun menjadi pembahasan serius bagi anggota dewan ketika rapat, hingga muncul hak interpelasi (hak bertanya) kepada Pemkot Surabaya. Salah satu anggota dewan yang paling getol untuk mengusulkan hak interpelasi adalah Simon Lekatumpessy, berikut hasil wawancaranya :

> *Rencana kenaikan pajak reklame tidak berpihak kepada rakyat, dengan rencana kenaikan hingga 38 persen sangat membebankan bagi para pengusaha reklame yang ada di Surabaya.*[86]

[86] Simon Lekatompessy, Wawancara 6 Agustus 2012, Jam 08.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa, Simon sangat getol untuk menolak kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Beliau yang juga menjadi pengusaha reklame tidak mau rugi karena kebijakan kenaikan pajak yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Pengusulan hak interpelasi menjadi salah satu cara yang digagas oleh Simon untuk mempengaruhi anggota dewan yang lain beserta pimpinannya agar menolak kebijakan tersebut. Maraknya kasus reklame juga ditanggapi serius oleh pimpinan DPRD, Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan Wakil DPRD Surabaya Ahmad Sufyanto (PKS) terkait hak interpelasi tersebut, berikut ini pernyataannya:

> *Sufyanto mengatakan, informasi yang dilontarkan oleh anggota DPRD dari fraksi PDS Simon Lekatompesy yang menyatakan, bahwa semua unsur pimpinan menyepakati adanya interpelasi itu tidak benar.*[87]

Hasil pernyataan diatas menunjukkan bahwasannya, Sufyanto tidak sejalan dengan pernyataan Simon. Sufyanto mengkhawatirkan adanya sebuah expansi wilayah bisnis terhadap suatu kebijakan yang ada, kekawatiran itu muncul bukan tanpa sebab, karena sosok Simon juga sebagai pengusaha reklame di Surabaya. Dalam perkembangan politik lokal era sekarang, politik perda menjadi kebijakan politis bagi para anggota dewan untuk membuat suatu rancangan undang-undang, tarik ulur kepentingan sering kali menjadi 'bumbu manis' tatkala suatu perda dibuat. Sehingga sulit dibedakan antara kebijakan yang dibuat benar-benar untuk rakyat atau untuk individu masing-masing.

Dan pada akhirnya terkait kasus reklame tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo meminta Pemerintah Kota Surabaya menurunkan tarif pajak reklame

---

[87] *FPKS-SURABAYA.COM*, 1 September 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas Perwali Surabaya No56 dan 57 Tahun 2010. Dengan perwali baru, kenaikan pajak sebesar 38 persen dibatalkan.

b. Respon Baktiono Terhadap Kebijakan Penerimaan Siswa Baru di Surabaya

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Surabaya periode 2012 kali ini dinilai banyak pihak sangat kacau. Yang menjadi permasalahan adalah terkait kebijakan kuota satu persen (1%) bagi siswa luar daerah yang ingin bersekolah di Surabaya, kuota yang diberikan dinas pendidikan Kota Surabaya kepada siswa yang berasal dari luar kota 1 persen itu kurang pas dan banyak menuai protes.[88] Apabila ditinjau lagi mengacu pada undang-undang sangatlah tidak relevan dengan kebijakan yang ada di Surabaya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, 'bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan'. Artinya, bahwa setiap warga Negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap semua orang untuk mendapatkan pendidikan, baik dari daerah sendiri atau luar daerah.

Persoalan inilah yang membuat geram Baktiono, beliau yang menjabat sebagai Ketua Komisi D bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, mengatakan bahwasannya kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait kuota satu persen untuk siswa yang berasal dari luar daerah perlu dikaji ulang, bahkan kalau melihat polemik yang terjadi saat ini akibat kebijakan tersebut PPDB di Surabaya sementara waktu bisa diberhentikan atau kebijakan tersebut dibatalkan.[89] Pembatalan yang dilontarkan Baktiono tersebut bukan tanpa dasar, pasalnya DPRD Surabaya khusunya Komisi D telah menerima

---

[88] *Warta Jatim.com,* 5 September 2012

[89] Baktiono, Wawancara 6 September 2012, Jam 20.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluhan protes dari orang tua siswa terkait pagu 1 % untuk siswa luar daerah. Menyikapi hal tersebut, Baktiono akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membicarakan persoalan ini.

Pada kasus tersebut dapat kita lihat performance Baktiono terhadap suatu kebijakan. Meskipun beliau berlatar belakang etnis Tionghoa, tatkala mendapat persoalan beliau tidak membeda-bedakan apa dan siapa yang mendapat persoalan tersebut. Posisinya sebagai anggota dewan bisa diapresiasi dengan memperjuangkan kostituennya. Posisinya sebagai Ketua komisi D bidang Pendidikan dan Kesejahteraan dilakukan dengan cara melakukan kontroling terhadap suatu kebijakan yang menyangkut bidangnya juga. Ketika seseorang menjadi anggota dewan, haruslah menanggalkan etnis, kepentingan, motif politis, dll, karena mereka harus fokus terhadap persoalan rakyat dan segala problemnya.

E. Respon Terhadap Keterlibatan Etnis Tionghoa Dalam Politik

Keterlibatan etnis Tionghoa di ranah politik mendapat respon yang sangat beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang merespon positif dan ada juga yang merespon negatif. Respon positif datang dari politisi PDS, beliau berpendapat :

> *Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik menunjukkan bahwasannya sudah tidak ada lagi sekte-sekte/batasan terhadap semua etnis atau kelompok untuk terjun ke politik. Hadirnya etnis Tionghoa dalam politik diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap bangsa dan Negara.*[90]

Apa yang dikemukan Isak, menunjukkan bahwasannya semua kalangan boleh tampil diranah politik. Tidak ada lagi batasan atau perlakuan diskriminatif

[90] Isak Bantu, Politisi PDS, Wawancara 4 Juli 2012, Jam 12.48 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti era Orde Baru, bila dikaitkan dengan Pancasila sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan untuk melakukan aktivitas di ranah publik atau pun politik.

Respon negatif juga muncul dikalangan etnis Tionghoa, keterlibatannya di politik dipandang sebelah mata dan diragukan. Bahkan muncul stigma negatif bahwasannya ada motif tertentu tatkala etnis Tionghoa terjun ke politik praktis, hal ini diungkapkan sebagai berikut :

> *Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik tidak lain hanya untuk melebarkan bisnis dan perdagangannya saja, mereka terjun ke politik praktis untuk memperkuat jaringan bisnisnya agar semakin jaya bisnis dan perdagangannya.*[91]

Serta juga ada yang meragukan partisipasi etnis Tionghoa dalam politik:

> *Jika berbicara kuantintas, Partisipasi etnis Tionghoa dalam politik sulit bisa berkembang dan mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan mind set/pola pokir masyarakat Tionghoa yang masih enggan untuk terjun ke politik, bahkan mereka lebih memilih bisnis dan perdagangannya saja.*[92]

Apa yang dikemukakan M. Hasyim Asy'ari menjadi poin tersendiri bagi masyarakat Tionghoa ketika terjun ke politik, tidak dapat dipungkiri memang ada etnis Tionghoa ketika terjun ke politik mempunyai motif seperti itu, tetapi secara global keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik tidak semuanya seperti itu. Kita lihat Kwik Kian Gie, beliau berhasil berkontribusi positif terhadap bangsa dan Negara yakni dengan menjadi Menteri di era Gus Dur dan Megawati.

---

[91] M. Hasyim Asy'ari, Staff Fraksi PKB, Wawancara 28 Juni 2012, Jam 13.10 WIB
[92] Aven Januar, Politisi PDIP, Wawancara 7 Juli 2012, Jam 14.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keraguan yang dimunculkan Aven Januar bisa dikatakan benar adanya, meskipun jika dibandingkan pada Orde Baru tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa mengalami kemajuan. Tetapi apabila dilihat secara global masih banyak etnis Tionghoa yang enggan terjun ke politik. Harapan kedepan adalah agar masyarakat Tionghoa lebih banyak lagi untuk terjun dan aktif kedunia politik dan mampu berkontribusi positif terhadap bangsa dan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peluang liberalisasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter dan diawali dengan sistem demokrasi membuka peluang bagi setiap golongan, suku, maupun etnis untuk terjun ke politik. Hal itu dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa untuk ikut berpartisipasi di bidang politik. Bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa di Surabaya dibedakan menjadi dua. *Pertama,* partisipasi aktif, dalam hal ini banyaknya masyarakat Tionghoa yang terjun ke partai politik atau politik praktis. Munculnya beberapa organisasi yang berlatar belakang Tionghoa. Seperti : Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Paguyuban Marga Tionghoa Surabaya (PMTS). *Kedua,* partisipasi pasif yaitu etnis Tionghoa yang hanya mengikuti atau bahkan tidak mengikuti kegiatan pemerintah, seperti pemilihan umum.
2. Keterlibatan politik anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa di Surabaya mempunyai motif politik yang berbeda-beda. Pertama, faktor lingkungan yang berpengaruh untuk membuat seseorang terjun ke dunia politik, baik keluarga atau kelompok pergaulan. Kedua, memanfaatkan era reformasi dan sistem demokrasi yang memberi peluang kepada semua warga Negara untuk memilih dan dipilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, modal ekonomi yang kuat menjadi kekuatan etnis Tionghoa untuk terjun ke dunia politik praktis.

3. Performance anggota dewan yang berasal dari etnis Tionghoa di Surabaya bisa dilihat dari individual masing-masing. Mereka tidak membawa kepentingan etnis didalamnya, tetapi motif politis menjadi salah satu faktor bagaimana sepak terjangnya di politik. Namun ada juga anggota dewan yang benar-benar mengemban amanah rakyat sesuai dengan apa yang dilakukan pada komisinya.

Saran

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik perlu diapresiasi positif. Namun apabila dilihat secara keseluruhan partisipasi politik etnis Tionghoa masih sangat kurang, banyak dari mereka yang masih enggan untuk bersinggungan dengan politik. Trauma politik masa lalu menjadi faktor utama bagi etnis Tionghoa untuk tidak terlibat dalam politik, namun di era demokrasi saat ini alangkah baiknya jikalau stigma trauma tersebut dihilangkan. Jadi, untuk era demokrasi sekarang yang mana semua kelompok, etnis, atau golongan mempunyai kebebasan untuk terjun di dunia politik. Begitupun juga dengan etnis Tionghoa, harapan kedepan adalah masyarakat Tionghoa agar lebih peduli lagi terhadap politik untuk kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Khoirul. 2006, *Perilaku Partai Politik*, Malang: UMM Press

Apter, David. 1988, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES

Arikunto, Suharsimi. 2000, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Asfar, Muhammad. 2006, *Pemilu dan Perilaku Pemilih,1955-2004,* Surabaya : Pustaka Eureka

Dahl, Robert. 1985, *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta: Rajawali

Effendi, Wahyu. 2008, *Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI.* Jakarta: Visimedia

Efriza. 2008, *Ilmu Politik (dari ilmu politik sampai sistem pemerintahan)*, Bandung: Alfabeta

Hidayat ZM. 1993, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Bandung: Tarsito

Ibad MN. 2012, *Bapak Tionghoa Indonesia,* Yogyakarta: LKIS

Koentjaraningrat. 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

La Ode, M.D. 2012, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*, Jakarta: Yayasan Obor

_____, 1997, *Tiga Muka Etnis Cina di Indonesia (fenomena di Kalimantan Barat, perspektif ketahanan nasional)*, Yogya: Biggraf publishing

Moeleong, J. Lexy. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Parekh, Bhikhu. 2008, *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius

Salim, Agus. 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* Jogdjakarta:

Sanit, Arbi. 1997, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Suhandinata, Justin. 2009, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, 1997, *Partai, Pemilih dan Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suryabrata, Sumadi. 2003, *Metodologi Penelitian* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suryadinata, Leo. 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa*, Jakarta: LP3ES

_____, 1988 *Kebudayaan Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Gramedia

Taher, Tarmizi. 1997, *Mentalitet Cina dan Pribumi (sebuah perbandingan dalam masyarakat Cina),* Jakarta: Censis

Wibowo, Thung Ju Lan (ed). 2010, *Setelah Air Mata Kering*. Jakarta: Kompas

Badan Pusat Statistik Surabaya

Laili Bariroh, *Politik Dalam Birokrasi*, (Yogyakarta, 2004)

Chee-Bang, Tan, *Cina Baba, Cina Non Baba dan Melayu : sebuah catatan interaksi etnis di Malaka,* dalam prisma No 11 Tahun. X.

WARTA INTI (Buletin Perhimpunan Indonesia Tionghoa), edisi 15 Februari 2012

Hasil Wawancara

Agus Santoso, anggota DPRD Surabaya, wawancara 19 Juli 2012

Aven Januar, Politisi PDIP, Wawancara 7 Juli 2012

Baktiono, Anggota DPRD, Wawancara 3 Agustus 2012,

Djono Antowijono, Ketua PMTS Surabaya, Wawancara 27 April 2012

Ernawati, anggota DPRD Surabaya, wawancara 3 Juli 2012

M. Hasyim Asy'ari, Staff Fraksi PKB, Wawancara 28 Juni 2012

Simon Lekatumpessy, anggota DPRD Surabaya, wawancara 5 Juni 2012

William, Wakil Ketua INTI Jawa Timur, Wawancara 27 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id